



DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN
RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

LKJPD



20
24





KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJPD) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJPD) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Infrastruktur. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

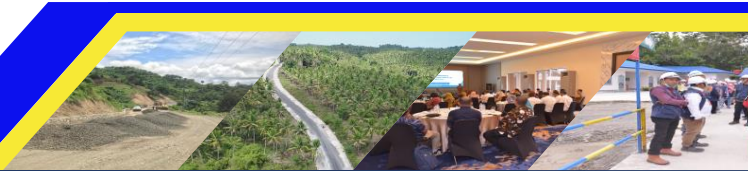
Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJPD) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palu, 18 Februari 2025
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah



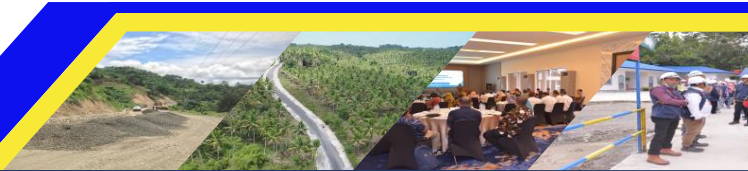
Dr. Ir. Faizul Keteng, S.T., M.Si., M.T.

Penjabat Utama Madya
NIP. 19770103 200012 1 002



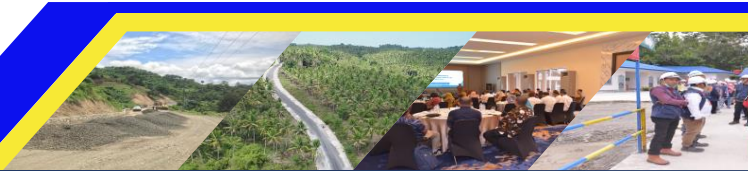
Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.3 Isu-Isu Strategis	8
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana	11
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	14
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	18
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	20
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
2.5 Perjanjian Kinerja	23
BAB III	28
AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja	28
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	29
3.1.2 Perbandingan Kinerja Terhadap Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	30
3.1.3 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2021-2026	31
3.1.4 Perbandingan Kinerja Terhadap Standar Nasional	32
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	35
3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	37
3.2 Analisis Sumber Daya & Realisasi Anggaran	50
3.3 Inovasi	66
BAB IV	71
PENUTUP	71



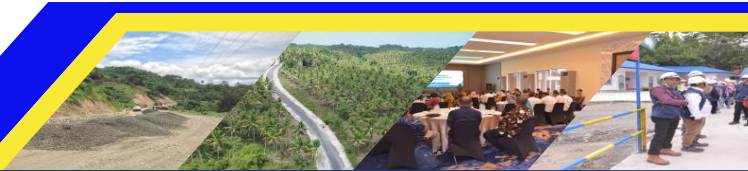
Daftar Tabel

Tabel I. 1 Rekapitulasi Barang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	13
Tabel I. 2 Tanggapan Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	14
Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	18
Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung.....	20
Tabel II. 4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung	22
Tabel II. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	23
Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi	25
Tabel III. 1 Capaian Kinerja Dinas BMPR berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
Tabel III. 2 Perbandingan Kinerja di Tahun lalu dan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	30
Tabel III. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2021-2026	31
Tabel III. 4 Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024.....	33
Tabel III. 5 Kinerja Dinas PUPR Provinsi Gorontalo tahun 2023.....	33
Tabel III. 6 Capaian Program Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan (IKU-1).....	39
Tabel III. 7 14 Jenis Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Provinsi)	43
Tabel III. 8 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	44
Tabel III. 9 Capaian IKU-2 dan Program Pendukung	46
Tabel III. 10 Capaian IKU-3 dan Program Pendukung	48
Tabel III. 11 Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024	49
Tabel III. 12 Tingkat Efisiensi Tiap Sasaran Strategis pada Pengelolaan Anggaran Tahun 2024	50
Tabel III. 13 Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 2024.....	51
Tabel III. 14 Realisasi Anggaran Tahun 2024	53
Tabel III. 15 Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Dinas BMPR 2024.....	65



Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Cascading Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah...	1
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	5
Gambar 1. 3 Kemantapan Jalan Provinsi	9
Gambar 1. 4 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Tengah	10
Gambar 1. 5 Persentasi Pegawai Berdasarkan Bidang	11
Gambar 1. 6 Persentasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	12
Gambar 1. 7 Persentasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Gambar III. 1 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dan 2024	30
Gambar III. 2 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sulawesi Tengah	40
Gambar III. 3 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Jalan Provinsi	41
Gambar III. 4 Kegiatan Pelatihan Ahli Muda Jasa Konstruksi dan Sertifikasi Tenaga Ahli	45
Gambar III. 5 Pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	47
Gambar III. 6 Diagram Realisasi Anggaran Dinas BMPR	64
Gambar III. 7 Logo Aplikasi Sistem Informasi Bina Jasa Konstruksi "SIBIJAK"	66
Gambar III. 8 Logo Aplikasi "SITARU"	67
Gambar III. 9 Piagam Penghargaan Lomba Kebersihan Lingkungan Se-Sulawesi-Tengah....	68
Gambar III. 10 Piagam Penghargaan Lomba Kebersihan Lingkungan Se-Sulawesi-Tengah pada tahun – tahun sebelumnya	68
Gambar III. 11 Piagam Penghargaan Kompetisi Tenaga Kerja SE-SULAWESI Tahun 2024..	69
Gambar III. 12 Piagam Penghargaan OPD Terbaik yang Membidangi Sub-Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi SE-SULAWESI Tahun 2024	69



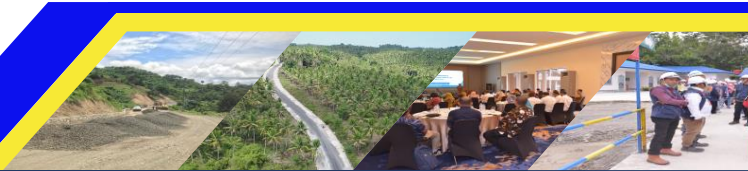
RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 tepatnya misi 4 **“Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah”** dengan tujuan **“Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Daerah”** hal tersebut sejalan dengan tujuan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Renstra OPD tahun 2021-2026 yakni **“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Berbasis Tata Ruang dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah”**

Tugas Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah lebih utama adalah untuk meningkatkan kemantapan jaringan jalan daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan jasa konstruksi daerah dan melaksanakan penataan ruang provinsi. Selain sasaran strategis yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan *Stakeholder eksternal*, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang juga berkewajiban untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan publik, dan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.

Untuk mencapai target Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 425.940.488.062, alokasi anggaran tersebut meningkat dari total pagu di tahun sebelumnya yang ditujukan untuk mengakomodasi kegiatan Rekonstruksi Jalan yang bersifat *Multi Years Contract (MYC)*, anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan perubahan akhir dokumen anggaran bertambah menjadi Rp. 513.553.349.164,11 Alokasi dana tersebut sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan daerah melalui peningkatan kemantapan jalan, sertifikat uji laik jalan, meningkatkan pelaksanaan penataan ruang dengan sosialisasi dan pengembangan sistem informasi penataan ruang, meningkatkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi daerah melalui peningkatan sertifikasi pelatihan ahli jasa konstruksi serta perwujudan reformasi birokrasi lingkup pemerintah daerah. Hal tersebut didukung dengan perwujudan 3 Sasaran Strategis Utama dan Sasaran Strategis Pendukung yang diimplementasikan dalam 3 Program Utama dan Satu Program Penunjang yang dilaksanakan dan didukung oleh 5 bidang dan satu Unit Pelaksana Teknis.

Dalam perjalanan pelaksanaan anggaran tahun 2024, penyerapan anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan hasil yang baik dengan yaitu 98,31%, meningkat dengan signifikan jika di bandingkan dengan penyerapan tahun sebelumnya sebesar 95,26%, pencapaian tersebut tentunya tidak terlepas dari seluruh pihak yang terlibat dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah baik pihak internal maupun eksternal. Laporan



kinerja Dinas BMPR tahun 2024 menyajikan capaian dari pelaksanaan 4 Program, 19 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan, dengan menggunakan anggaran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selanjutnya untuk capaian tahun 2024 mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) yang disajikan pada tabel berikut:

No	Indikator kinerja	Sat	Target	Realisasi	Capaian (%)	Gap
1	Kemantapan Jalan Provinsi	%	63,93	64,98	101,64	1,05
2	Indeks penyelenggaraan jasa konstruksi daerah	Indeks	1.00	1.00	100	0.00
3	Ketaatan terhadap RTRW	%	76,40	76,40	100,00	0

Capaian yang ditargetkan pada tahun 2024 sebagian besar telah terlaksana 100% terhadap ketentuan yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja maupun target yang ada di Rencana Strategis (Renstra) OPD. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah tetap memacu pelaksanaan pekerjaan agar terlaksana lebih efisien dan lebih efektif untuk di tahun - tahun berikutnya agar dapat mencapai target. Mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan perhatian terhadap pemanfaatan laporan kinerja, aspek-aspek yang menjadi penekanan yaitu perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai atas laporan kinerja serta bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, sehingga kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan dapat dijadikan dasar peningkatan kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah di tahun yang akan datang.

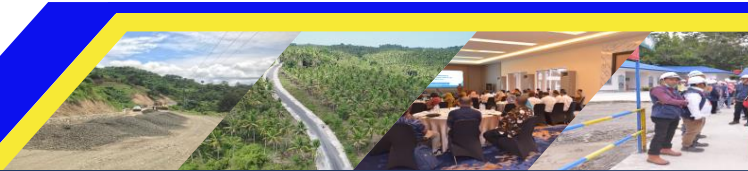
LKJPD 2024

BAB I PENDAHULUAN

- Cascading Kinerja
- Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- Isu - isu Strategis
- Dukungan SDM, Sarana Prasarana
- Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023



Dinas Bina Marga dan
Penataan Provinsi Sulawesi
Tengah



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJPD)/Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic plan*). Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Laporan Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat Dinas BMPR Tahun 2024 ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atas penggunaan Anggaran tahun 2024. Dalam Laporan Kinerja Dinas ini diuraikan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*Disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah, tepatnya penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Adapun Cascading Kinerja Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah dapat di lihat pada gambar di bawah ini:

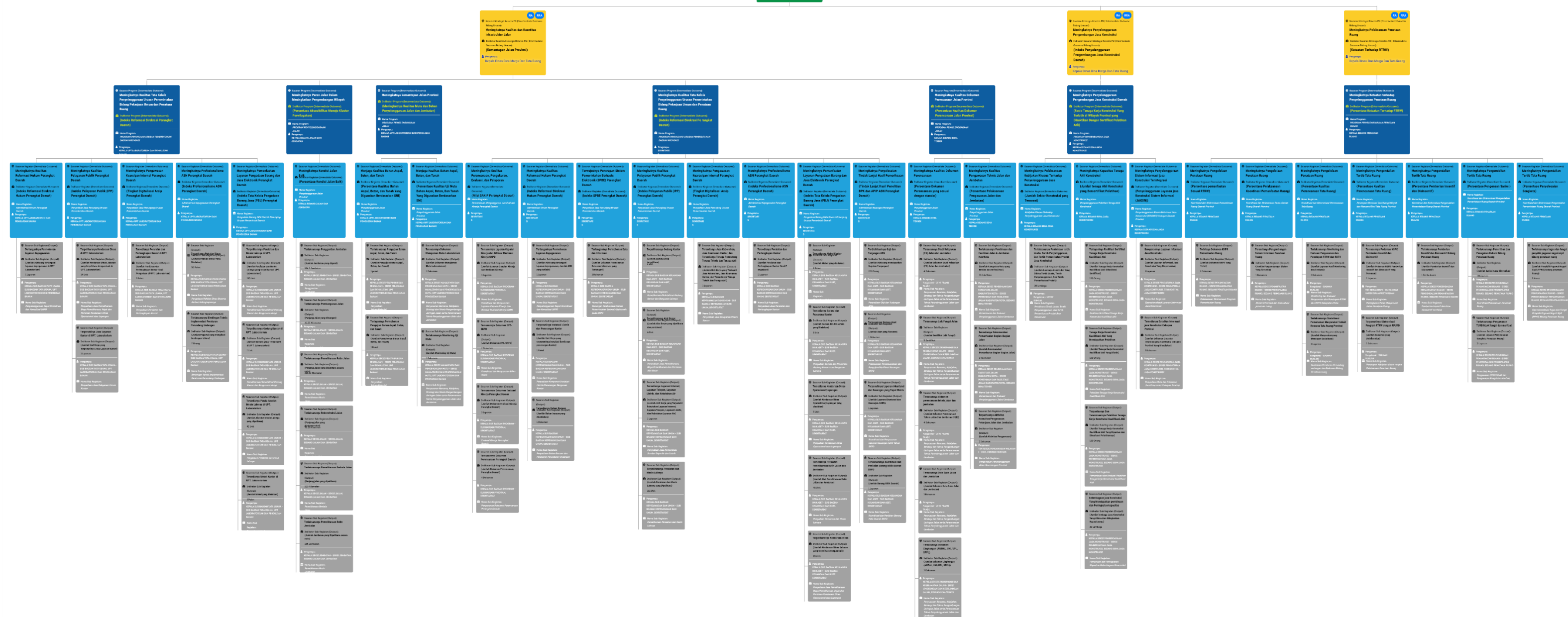
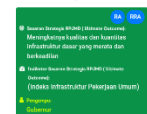
RPJMD

MISI 4 RPJMD : MEWUJUDKAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH

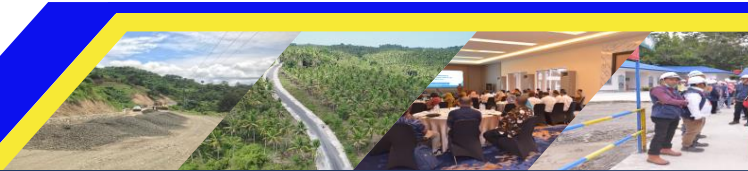
SASARAN RPJMD 2.1

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang



Gambar 1. 1 Cascading Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah



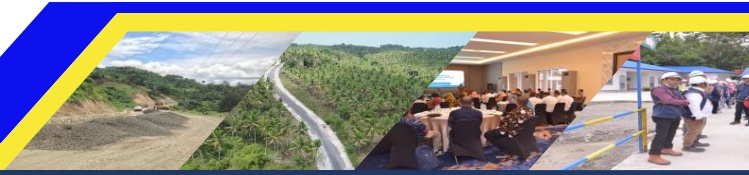
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk sesuai amanah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah yang menetapkan kedudukan, tipe, dan struktur organisasi, maka Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga dan Penataan Ruang serta urusan bidang Bina Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang bina teknik, jalan, jembatan, bina konstruksi dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang bina teknik, jalan, jembatan, bina konstruksi dan penataan ruang;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina teknik, jalan, jembatan, bina konstruksi dan penataan ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang bina teknik, jalan, jembatan, bina konstruksi dan penataan ruang;
5. Penyelenggaraan upbd dan jabatan fungsional; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.

Pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pembangunan jalan dan jembatan sebagai infrastruktur transportasi mengacu pada tata ruang, memenuhi standar keselamatan jalan, dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, sebagaimana tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis. Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah sendiri memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026, dengan visi **“GERAK CEPAT MENUJU SULTENG LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”** serta mewujudkan misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM
2. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.



Dari segi tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang secara umum bertanggungjawab dalam pemenuhan misi yang kedua “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah” namun dalam pelaksanaannya secara tidak langsung Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang ikut mendukung pencapaian Misi yang lain.

Adapun struktur organisasi Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat di lihat pada uraian di bawah ini:

Kepala Dinas

Sekretaris

- ❖ *Sub Bagian Program;*
- ❖ *Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan*
- ❖ *Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;*

Bidang Bina Teknik

- ❖ *Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan; dan*
- ❖ *Seksi Pembinaan dan Fasilitas Jalan Kabupaten/Kota;*
- ❖ *Kelompok Jabatan Fungsional*

Bidang Jalan dan Jembatan

- ❖ *Seksi Jalan;*
- ❖ *Seksi Jembatan; dan*
- ❖ *Kelompok Jabatan Fungsional*

Bidang Bina Jasa Konstruksi membawahi:

- ❖ *Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;*
- ❖ *Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan*
- ❖ *Kelompok Jabatan Fungsional*

Bidang Penataan Ruang membawahi:

- ❖ *Seksi Pemanfaatan Ruang; dan*
- ❖ *Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;*
- ❖ *Kelompok Jabatan Fungsional*

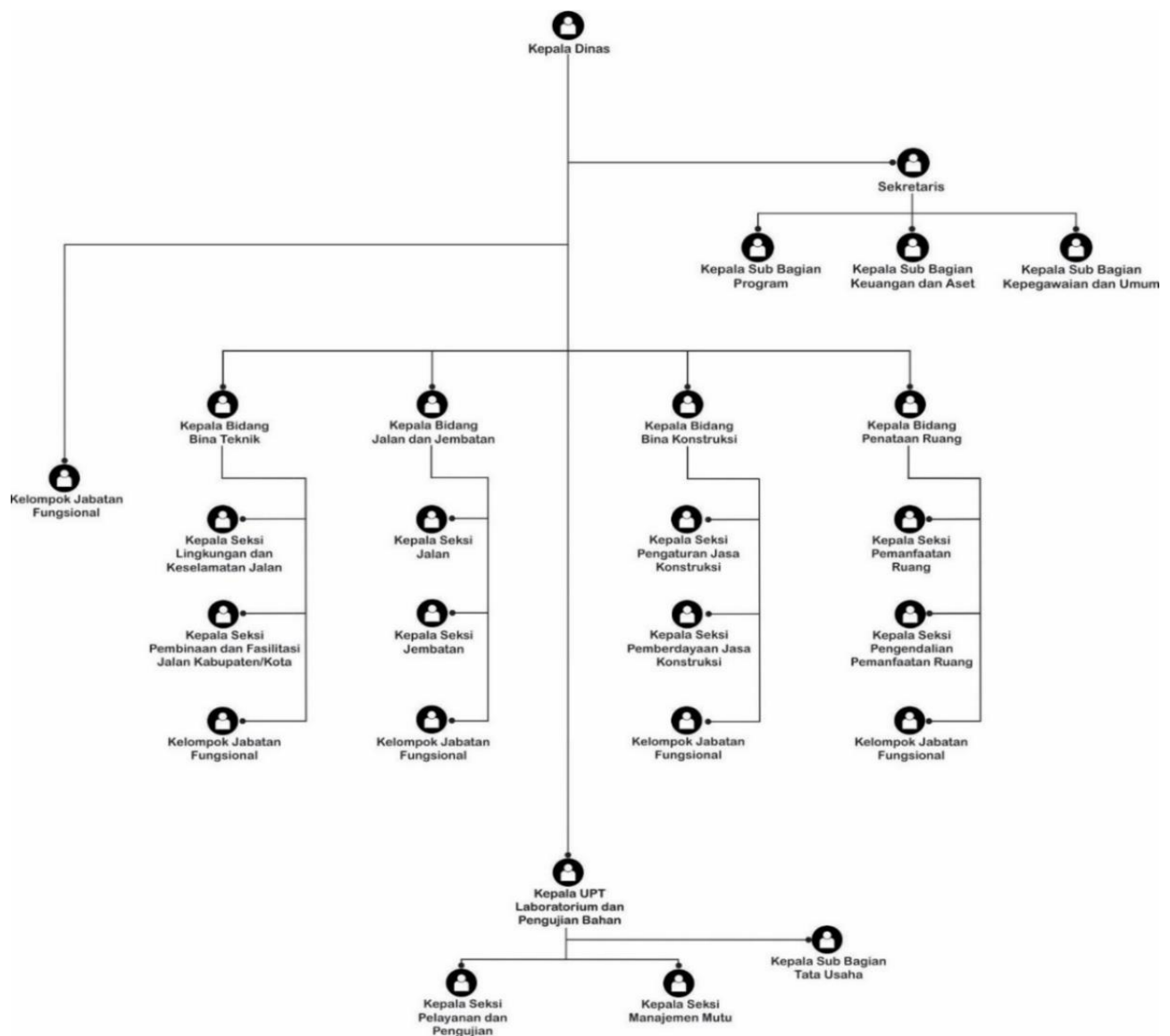
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Pengujian Bahan membawahi;

- ❖ *Sub Bagian Tata Usaha;*
- ❖ *Seksi Pelayanan dan Pengujian; dan*
- ❖ *Seksi Manajemen dan Pengendalian Mutu.*

Kelompok Jabatan Fungsional.

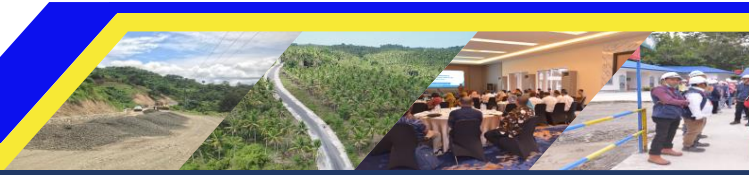
Tugas dan Fungsi

Adapun uraian tugas dan fungsi untuk masing-masing bidang dan Unit Pelaksana Teknis yaitu:

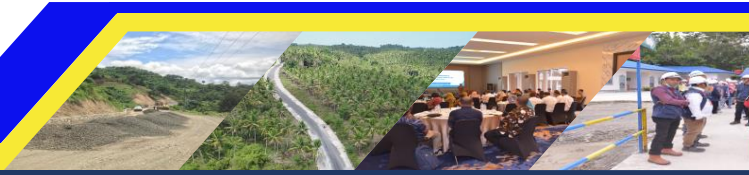


Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

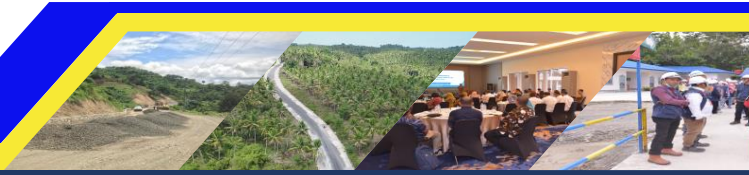
- 1) **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program keuangan, aset, kepegawaian, umum dan kopri di lingkungan dinas. Dalam menyelenggarakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - b) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum
 - c) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - d) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;



- e) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - g) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.
- 2) **Bidang Bina Teknik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi perencanaan, pengawasan teknis jalan, jembatan, lingkungan, keselamatan jalan, dan pembinaan jalan Kabupaten/Kota. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Bina Teknik mempunyai tugas:
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan, Lingkungan, Keselamatan Jalan, dan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan, Lingkungan, Keselamatan Jalan, dan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
 - c) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Perencanaan, Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan, Lingkungan, Keselamatan Jalan, dan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
 - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - e) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Bidang Bina Teknik.
- 3) **Bidang Jalan dan Jembatan** mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis operasional, melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum dan pembangunan dan pemeliharaan dibidang Jalan, Jembatan, peralatan dan perbekalan. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Jalan, Jembatan, dan peralatan dan perbekalan;
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Jalan, Jembatan, dan peralatan dan perbekalan;
 - c) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Jalan, Jembatan, peralatan dan perbekalan;
 - d) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Jalan, Jembatan, peralatan dan perbekalan;
 - e) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan penyelenggaraan tugas dibidang Jalan, Jembatan, peralatan dan perbekalan;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - g) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Jalan dan Jembatan.



- 4) **Bidang Bina Jasa dan Konstruksi** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Bina Jasa dan Konstruksi mempunyai fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, pengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi;
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi;
 - c) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, pengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi;
 - d) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Bina Jasa dan Konstruksi.
- 5) **Bidang Penataan Ruang** mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan pembinaan bidang Bina Konstruksi yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;
 - c) Penyelenggaraan pembinaan dalam aspek pengaturan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
 - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - e) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Penataan Ruang.
- 6) **UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan** mempunyai tugas merencanakan program dan kegiatan, mendistribusikan dan mengarahkan tugas kepada Sub Bagian dan Seksi, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan, melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh



Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Laboratorium dan Pengujian Bahan;
- b) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang Laboratorium dan Pengujian Bahan;
- c) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan.

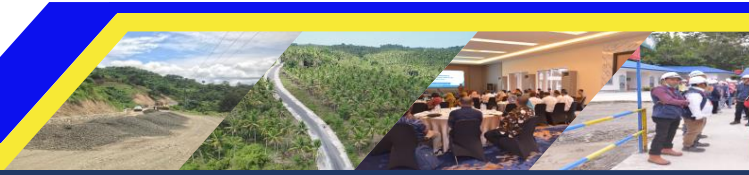
Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.3 Isu-Isu Strategis

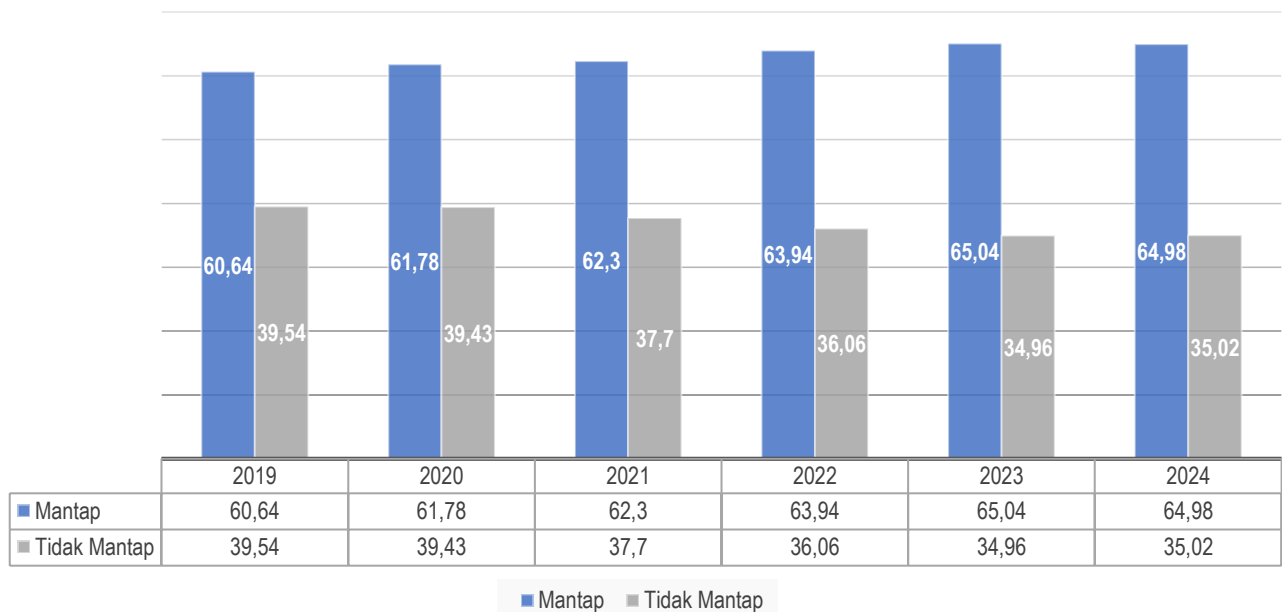
Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah memegang peran penting dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan dan meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui penyelenggaraan jalan dan jembatan, peningkatan tenaga kerja konstruksi bersertifikat ahli, serta penerapan penataan ruang sesuai dengan RTRW berlaku. Pembangunan infrastruktur jalan diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, berupa peningkatan konektivitas jaringan jalan antar simpul-simpul transportasi.

Hampir seluruh jalan provinsi di Sulawesi Tengah merupakan lintas penghubung, yang menghubungkan 3 lintas utama di Pulau Sulawesi, yaitu Lintas Barat (Nasional), Lintas Tengah (Nasional), dan Lintas Timur (Nasional). Disamping itu, dengan fungsinya sebagai jalan kolektor primer, jalan provinsi di Sulawesi Tengah juga berperan dalam menghubungkan secara efisien Kota Palu dengan ibukota kabupaten serta antar ibukota kabupaten. Dengan fungsi tersebut, tingkat pelayanan jalan provinsi idealnya harus senantiasa baik sepanjang tahun, tidak saja dalam aspek kemantapan, namun juga dalam aspek keterhubungan (konektivitas). Kedua aspek merupakan unsur strategis dalam mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan. Ke-2 aspek ini juga merupakan unsur daya saing daerah dari perspektif investasi sebab merupakan elemen pendukung utama pada pola pergerakan barang dan logistik.

Kemantapan jalan Provinsi pada tahun 2023 mencapai 65,04% dari panjang total 1.643,74 km, namun pada tahun 2024 capaian kemantapan jalan provinsi tercapai akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kemantapan jalan provinsi menurun menjadi 64,98% dengan total jalan provinsi sekitar 1.683,15 Km, dikarenakan adanya perubahan SK fungsi dan status jalan provinsi dimana terjadi penambahan ruas jalan provinsi dari 80 ruas menjadi 88 ruas jalan. Jika memperhatikan kemampuan fiskal daerah, kemantapan jalan provinsi tidak akan dapat mengejar ketimpangannya terhadap kemantapan jalan nasional. Sehingga hal yang realistis untuk dilakukan adalah meningkatkan sinergisme program penyelenggaraan jalan antar pemerintah, agar kemantapan jalan dapat meningkatkan PDRB daerah serta mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi

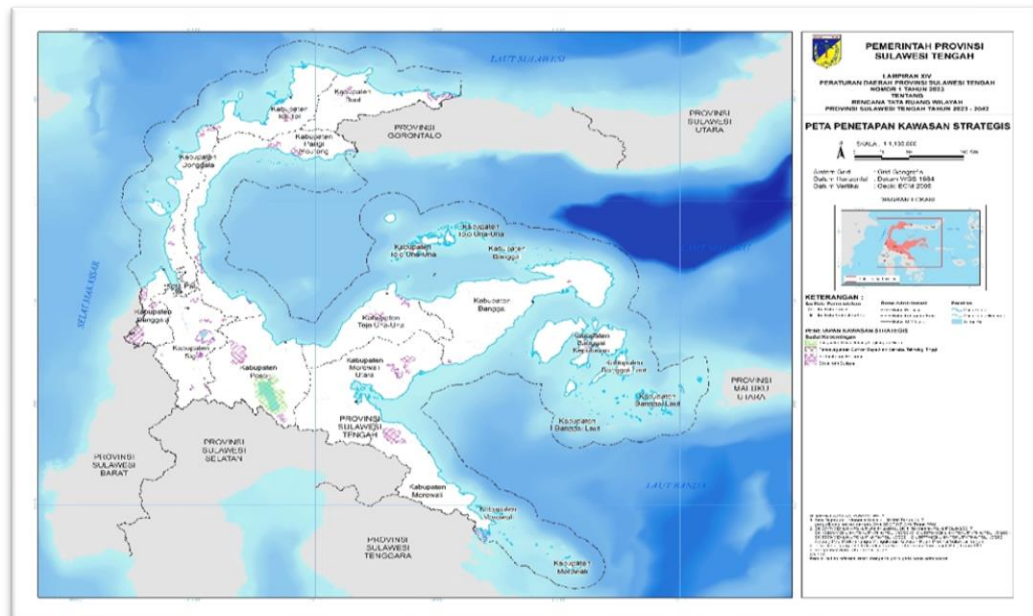


Tengah melalui OPD terkait, perlu mendorong setiap pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menentukan rencana strategis penyelenggaraan jalannya, yang selanjutnya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan program pemerintah provinsi serta pemerintah pusat. Sementara itu dari segi keselamatan jalan, untuk tahun-tahun sebelumnya kelaikan jalan belum dimasukkan dalam kegiatan utama Dinas BMDPR Provinsi Sulawesi Tengah. Ke depan kelaikan jalan yang menunjukkan tingkat keselamatan jalan perlu menjadi perhatian utama demikian pula peningkatan kemandirian jaringan jalan di wilayah kabupaten/kota itu sendiri. Sebab disamping akan menunjang percepatan dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya, aspek kemandirian jaringan jalan dan keselamatan jalan juga merupakan salah satu unsur daya saing daerah.



Gambar 1. 3 Kemantapan Jalan Provinsi

Berkenaan dengan hal integrasi secara spasial, pemerintah pusat telah menetapkan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di setiap provinsi berdasarkan potensi masing-masing provinsi, agar pembangunan menjadi lebih fokus yang kemudian dapat memberikan manfaat lebih besar bagi percepatan pembangunan daerah. Kebutuhan infrastruktur penunjang WPS juga telah diindikasikan. Berikutnya, yang dibutuhkan adalah mengoptimalkan pelaksanaan penataan ruang, yang mencakup penyebaran informasi penataan ruang, sosialisasi dan pengoptimalan penertiban dan penegakan hukum Bidang Penataan Ruang, agar kebijakan RTRW yang dihasilkan dapat menunjang pengembangan kawasan strategis, sekaligus untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan bermutu. Penetapan perda RTRW-P Tahun 2023-2042 No 1 tahun 2023 menjadi pedoman terhadap pelaksanaan penataan ruang kedepannya berdasarkan indikasi program yang telah ditetapkan.

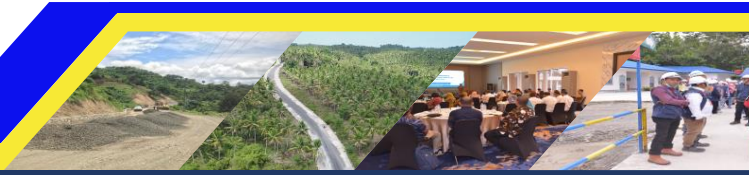


Gambar 1. 4 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Tengah

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang perlu ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketimpangan-ketimpangan dapat terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam hal SDM bidang jasa konstruksi, permasalahan utama adalah penyediaan jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat ahli, yang dipenuhi melalui pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi/diseminasi pedoman-pedoman teknis yang berujung pada uji kompetensi. Pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) serta asosiasi profesi terkait. Dengan meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi bersertifikat ahli, maka dapat diharapkan produktivitasnya meningkat dan sekaligus akan lebih menjamin diperolehnya infrastruktur yang berkualitas. Problemnya, apresiasi perusahaan jasa konstruksi di daerah, Sulawesi Tengah pada khususnya, masih rendah. Kedepan, hal ini perlu menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah daerah, LPJK, maupun asosiasi profesi terkait.

Peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat perlu dibarengi dengan peningkatan pangsa pasar jasa konstruksi, agar tenaga kerja konstruksi tersebut dapat tertampung dan kemudian dapat berproduksi. Dalam kaitan ini, potensi pangsa pasar di daerah perlu dipublikasikan, baik yang bersumber dari dana APBN, APBD, maupun sumber pendanaan lainnya. Demikian pula informasi penting lainnya tentang jasa konstruksi di daerah. Pemerintah telah membuat Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) untuk memfasilitasi maksud tersebut, dan mewajibkan seluruh daerah untuk mengaplikasikannya, sebab disamping meningkatkan kemudahan mengakses informasi usaha jasa konstruksi,



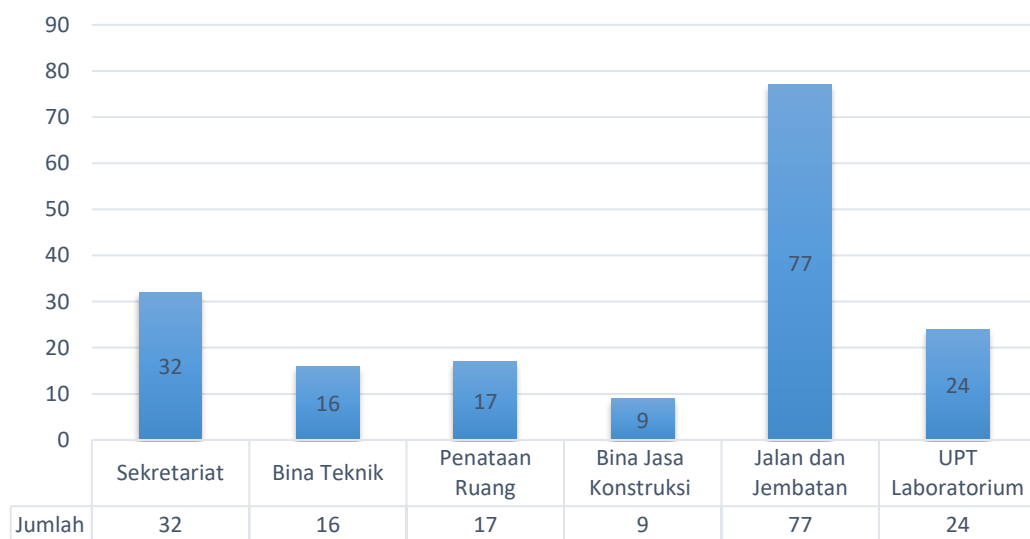
SIPJAKI juga dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi. Namun implementasinya oleh pemerintah daerah masih jauh dari harapan.

Berdasarkan uraian diatas, maka isu strategis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dari perspektif Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

- 1) Kemantapan Jalan Provinsi merupakan pendukung percepatan dan pemerataan pembangunan
- 2) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap indikasi program yang ada di dalam RTRW Provinsi
- 3) Penyelenggaraan penyediaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat ahli.

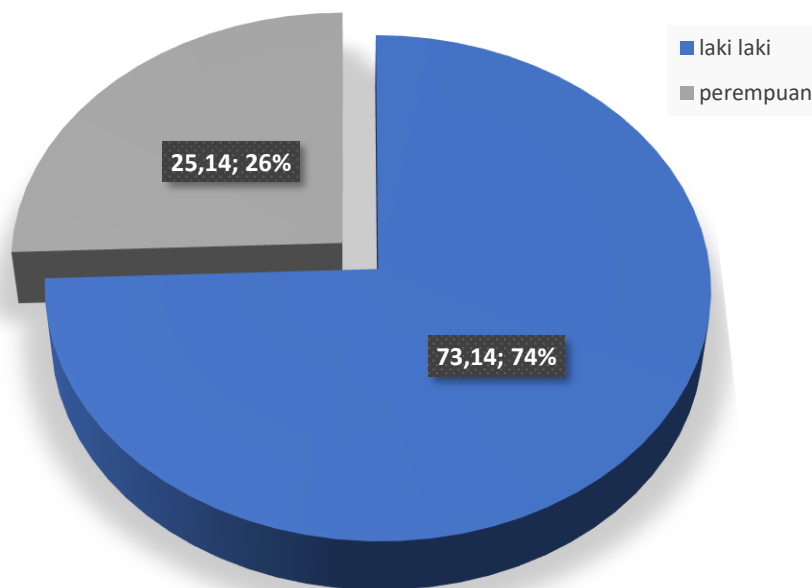
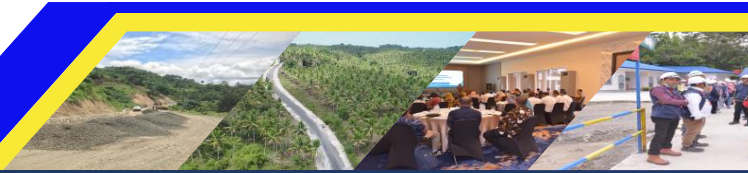
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasaranan

Sumber daya manusia (SDM) merupakan peran kunci bagi kesuksesan organisasi, oleh karena itu Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai dengan kondisi pegawai ASN terhitung tanggal 31 Desember 2024 berjumlah sekitar 175 orang. Adapun sebaran pegawai terbanyak tersebar di Bidang Jalan dan Jembatan sebanyak 77 pegawai atau sekitar 44,00%. Jumlah pegawai di Bidang Jalan Jembatan lebih banyak dari bidang-bidang lain mengingat rentang kegiatan di Bidang Jalan Jembatan sangat luas jika dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Selanjutnya sebaran pegawai untuk bidang lain terlihat pada gambar di bawah.

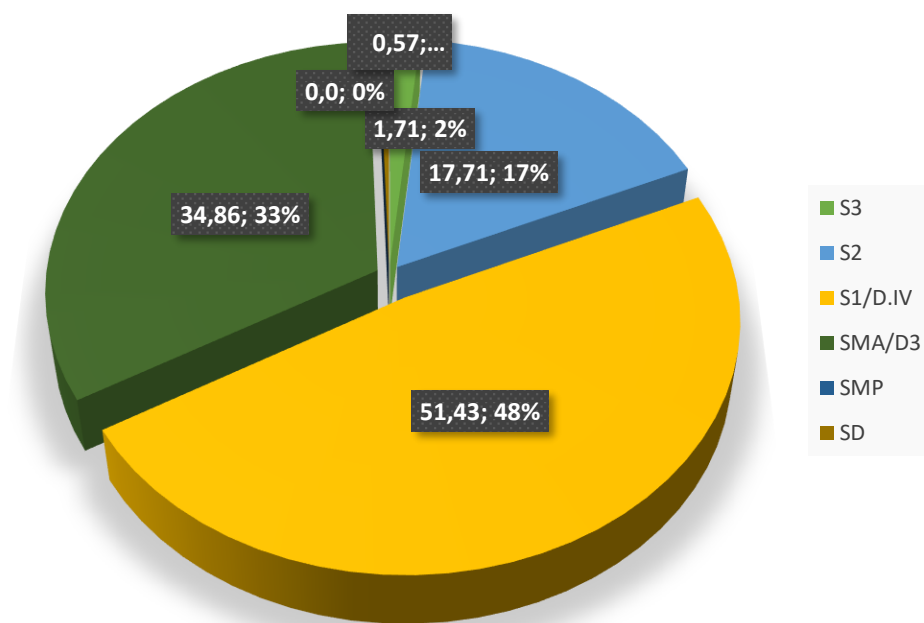


Gambar 1. 5 Persentasi Pegawai Berdasarkan Bidang

Dari seluruh pegawai Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah yang ada, terdapat 73,14% pegawai laki-laki sementara pegawai perempuan sebanyak 25,14%. Namun, dikarenakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang menjalankan fungsi pembangunan infrastruktur sehingga kebutuhan pegawai yang direkrut sebelumnya adalah pegawai teknis yang sebagian besar adalah laki-laki.

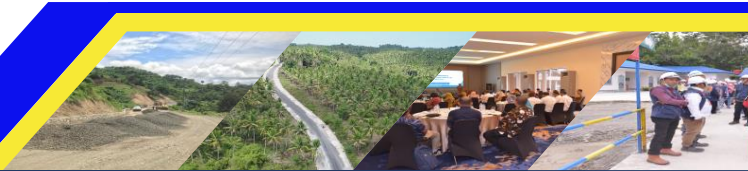


Gambar 1. 6 Persentasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1. 7 Persentasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dengan keterbatasan jumlah PNS tersebut, manajemen SDM Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah harus dapat dioptimalkan dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, diantaranya dengan peningkatan kompetensi dan keahlian para SDM muda, antara lain melalui lanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan melalui diklat-diklat teknis agar memiliki kompetensi yang lebih baik.



Adapun sarana dan prasarana Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 berdasarkan rekapitulasi barang pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I. 1 Rekapitulasi Barang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Kode	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Harga (Ribuan)
1	1.01	Tanah	314.102.942.577,00
2	2.01	Alat Besar	21.905.812.445,00
	2.02	Alat Angkutan	13.097.769.550,00
	2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.751.590.562,00
	2.04	Alat Pertanian	19.734.000,00
	2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.406.038.303,00
	2.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.375.265.054,00
	2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	28.759.000,00
	2.08	Alat Laboratorium	7.056.060.817,00
	2.09	Alat Persenjataan	0,00
	2.10	Komputer	7.738.008.578,00
	2.11	Alat Eksplorasi	0,00
	2.12	Alat Pengeboran	4.200.000,00
	2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00
	2.14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00
	2.15	Alat Keselamatan Kerja	0,00
	2.16	Alat Peraga	0,00
	2.17	Peralatan Proses/Produksi	0,00
	2.18	Rambu – Rambu	71.552.000,00
	2.19	Peralatan Olahraga	0,00
3	3.01	Bangunan Gedung	18.312.941.754,00
	3.02	Monumen	0,00
	3.03	Bangunan Menara	0,00
	3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00
4	4.01	Jalan dan Jembatan	2.602.176.641.970,81
	4.02	Bangunan Air	1.260.346.000,00
	4.03	Instalasi	1.652.875.150,00
	4.04	Jaringan	0,00
5	5.01	Bahan Perpustakaan	4.453.968.111,00
	5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00
	5.03	Hewan	0,00
	5.04	Biota Perairan	0,00
	5.05	Tanaman	537.928.000,00
	5.06	Barang Koleksi Non Budaya	0,00
	5.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	136.407.586.653,77



No	Kode	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Harga (Ribuan)
6	6.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.007.911.014,50
7	7.01	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00
	7.02	Aset Tidak Berwujud	0,00
	7.03	Aset Lain - lain	41.254.582.342,00

Sumber: Rekapitulasi Mutasi Barang Dinas BMPR Tahun 2024

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Berdasarkan Berita Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di laporkan oleh Inpektorat Daerah Sulawesi Tengah terhadap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 700.1.2.1/076/LHP-E AKIP/PROV/IRBAN1/202, dengan nilai **80.45 (A/ Memuaskan)** mendapatkan beberapa tindak lanjut antara lain:

Tabel I. 2 Tanggapan Atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

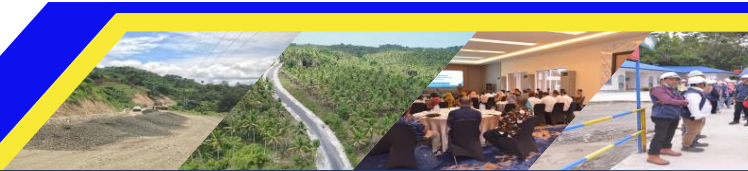
No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut
1	Lakukan perbaikan terhadap dokumen rencana aksi	Telah ditindak lanjuti dengan penyesuaian arsitektur kinerja
2	Apabila pada pohon kinerja terdapat kinerja urusan/sektor lain, libatkan instansi dan pengampu lainnya	Dengan penyesuaian arsitektur kinerja, Seluruh bidang yang berkaitan dengan Sektor maupun urusan lain telah dimasukkan dalam perjanjian Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tahun 2024
3	Tampilkan progres capaian secara keseluruhan dalam laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja	Telah ditindak lanjuti melalui Monitoring E-MEP yang diadakan setiap sebulan sekali kemudian dilakukan sinkronisasi terhadap Rencana Aksi sehingga diketahui bentuk reward atau punishment yang akan diberikan
4	Susun pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date dan SOP yang jelas	SOP pengumpulan data kinerja pada pejabat fungsional pada Triwulan 4 berjalan masih dalam permintaan Publikasi telah dilakukan melalui website Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
5	Publikasikan Laporan Kinerja secara luas agar dapat diakses masyarakat	https://bimatarung.sultengprov.go.id/
6	Lakukan sosialisasi atas laporan kinerja pada seluruh pegawai, termasuk sosialisasi tentang Indikator Kinerja Individu (IKI) dan target kinerja ke semua pegawai	Sosialisasi mengenai Indikator Kinerja Individu telah dilakukan kepada pejabat fungsional dan pejabat pelaksana

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- Strategi dan Arah Kebijakan
- Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
- Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Perjanjian Kinerja



Dinas Bina Marga dan
Penataan Provinsi Sulawesi
Tengah



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dibutuhkan untuk menentukan fokus dan kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan merupakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran strategis daerah yang tertuang dalam RPJMD. Tujuan juga menjelaskan perubahan yang diharapkan dapat dicapai melalui serangkaian tindakan atau program yang akan dirancang. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun selama periode lima tahun ke depan, adapun tujuan dan sasaran Dinas BMDPR Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Berbasis Tata Ruang Dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (***Good Governance and Clean Government***)

Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun selama periode lima tahun kedepan. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis Dinas BMDPR Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- ❖ Tujuan I: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Berbasis Tata Ruang Dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang dicapai melalui sasaran strategis:
 - 1) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan
 - 2) Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - 3) Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang
- ❖ Tujuan II: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (***Good Governance and Clean Government***) yang dicapai dengan Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan.

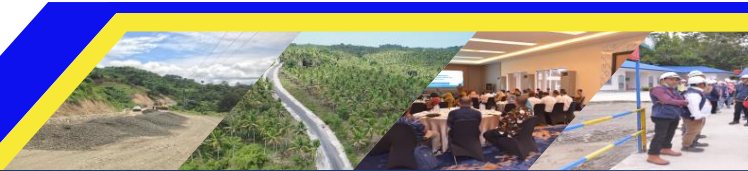
Secara rinci tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja Dinas BMDPR Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2021-2026 dijabarkan dalam tabel berikut:



Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Awal 2021	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Berbasis Tata Ruang Dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		Indeks Infrastruktur Kebinamargaan dan Penataan Ruang	0,80	0.85	0.87	0.89	0.94	1.00
		Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	0.82	0.87	0.87	0.89	0.95	1.00
		Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	0.50	0.57	0.86	1.00	1.00	1.00
		Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	15.37	32.58	49.44	66.29	83.5	100
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Government)		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	60	60	62	62	64
		Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	60	60	62	62	64

Sumber: Renstra Dinas **BMPR 2021-2026**

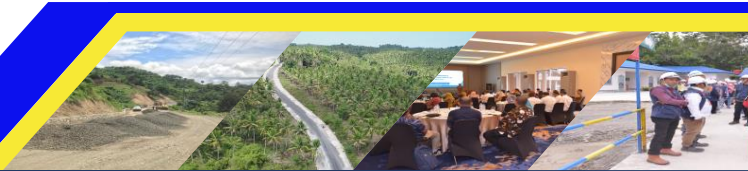


2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pelayanan dimaksudkan sebagai cara/proses intervensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rentang waktu tertentu. Dengan demikian strategi juga merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan kebijakan adalah pedoman dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Demi mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing, strategi dan kebijakan Dinas BMDPR Provinsi Sulawesi Tengah dalam tahun pertama periode 2021-2026, harus juga dapat mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatannya sedemikian hingga mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan perlu lebih spesifik bahkan diperluas, tidak hanya menekankan pada kualitas keluaran dari kegiatan dalam lingkup kewenangannya, namun juga pada kepedulian terhadap kualitas keluaran dari kegiatan dalam lingkup pemerintah kabupaten/kota. Strategi dan kebijakan Dinas BMDPR Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Strategi	Kebijakan
SS-1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan	
Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah.	- Melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen Perangkat Daerah (RKA, DPA); Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD secara berkala. - Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis TI. - Optimalisasi SDM yang ada sesuai tingkat kompetensinya.
Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung. - Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD (penyediaan dan pelaporan). - Meningkatkan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Meningkatkan penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik dan Barang Cetak/penggandaan serta bahan lainnya; Melaksanakan Fasilitasi kunjungan Tamu dan penyelenggaraan rapat-rapat SKPD; Melaksanakan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD.melalui diklat/bimbingan teknis/ pelatihan berbasis kompetensi.
Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	



Strategi

Kebijakan

SS-2 : Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan

Mengembangkan survei teknis pada koridor terpilih untuk meningkatkan kualitas infrastruktur. Provinsi sesuai dengan RTRW.

Melakukan penanganan/peningkatan kondisi jalan dan jembatan sesuai dengan tingkat kerusakan dan skala prioritas, sembari mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun.

Melakukan harmonisasi sistem jaringan dan penanganan jalan terutama pada ruas jalan antarkabupaten/kota dan ruas jalan yang menunjang pengembangan kawasan strategis

- Penguatan kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan.
- Penguatan kegiatan survey kondisi jalan dan laik fungsi jalan.
- Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan, rekonstruksi jalan serta penggantian jembatan utamanya pada ruas dengan kondisi rusak – rusak berat.
- Penguatan kegiatan pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin (SDM, anggaran, peralatan, metode) jalan & jembatan sesuai kondisi.
- Pelibatan masyarakat miskin dan pencari kerja dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- Peningkatan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan jalan/jembatan

SS-3 : Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Peningkatan kapasitas SDM penyedia dan pengguna jasa konstruksi, guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja.

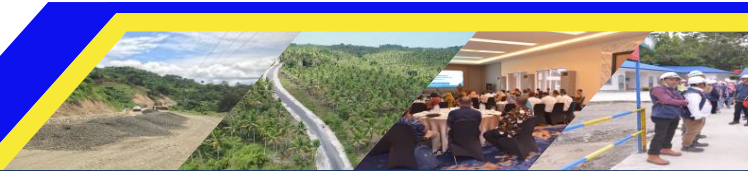
Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

- Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi
- Peningkatan pengelolaan informasi jasa konstruksi
- Penyediaan informasi Kerja Sama Pemerintah Daerah & Badan Usaha (KPDBU)
- Peningkatan kerja sama antarpemerintah pusat dan daerah tentang peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- Penguatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

SS-4 : Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang

Mengoptimalkan perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian penataan ruang provinsi.

- Melakukan penyelarasan dan penetapan perubahan RTRW Provinsi
- Malaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan penataan ruang
- Penguatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah serta system informasi tata ruang
- Penguatan kelembagaan POKJA pengendalian pemanfaatan ruang



Strategi

Kebijakan

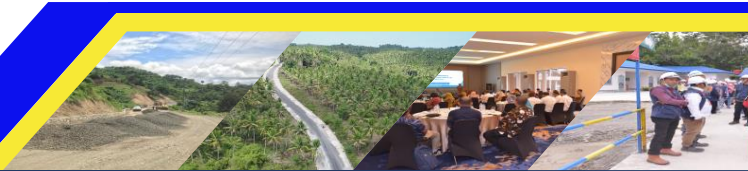
- Peningkatan kapasitas aparat pengawas pemanfaatan ruang, melalui sosialisasi/ bimtek peraturan terkait/ NSPK.

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program Kerja adalah susunan daftar kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu periode. Program kerja ini akan menjadi tolak ukur pencapaian kinerja suatu OPD. Adapun struktur program dan kegiatan Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

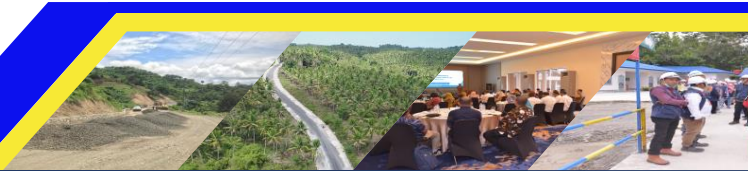
Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	17.115.291.314	18.882.812.999,25	+ (Bertambah)
		Pembangunan Jalan	48.593.192.865	80.664.185.651	+ (Bertambah)
		Rekonstruksi Jalan	275.002.211.188	295.864.987.903	+ (Bertambah)
		Pemeliharaan Berkala Jalan	5.610.000.300	30.896.979.300	+ (Bertambah)
		Pemeliharaan Rutin Jalan	15.898.288.361	16.153.795.361	+ (Bertambah)
		Penggantian Jembatan	2.462.650.150	5.504.417.925	+ (Bertambah)
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.298.415.142	2.430.395.142	+ (Bertambah)
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Pengawasan	239.545.100	239.545.100	Tidak Berubah
		Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	7.047.836.625	6.879.971.079,20	- (Berkurang)
		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	314.873.247	229.055.250	- (Berkurang)
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	298.877.750	192.377.750	- (Berkurang)
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	564.789.850	578.389.850	+ (Bertambah)



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	42.074.350	30.804.350	- (Berkurang)
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	229.376.600	199.346.600	- (Berkurang)
		Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	125.115.550	114.365.550	- (Berkurang)
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	83.876.400	88.325.400	+ (Bertambah)
		Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	211.915.800	272.640.800	+ (Bertambah)
		Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	228.112.025	186.047.025	- (Berkurang)
		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	206.439.650	206.439.650	Tidak Berubah
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	302.807.350	302.807.350	Tidak Berubah
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	58.747.900	58.747.900	Tidak Berubah
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	137.480.450	137.480.450	Tidak Berubah
		Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	117.117.050	142.071.050	- (Bertambah)
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	241.318.350	319.036.350	+ (Bertambah)
		Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	82.550.750	60.178.750	- (Berkurang)
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	48.864.800	48.564.800	- (Berkurang)

Sumber: Data Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024



Tabel II. 4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung

Pencapaian Sasaran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.327.952.900	1.425.856.235	+ (Bertambah)
2	Adminlstrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.874.299.893	23.190.659.218,66	+ (Bertambah)
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	631.614.550	696.649.150	+ (Bertambah)
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.126.624.949	1.654.140.039	+ (Bertambah)
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.219.267.195	9.572.769.985	+ (Bertambah)
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.186.638.620	7.499.620.870	+ (Bertambah)
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.232.297.904	3.805.969.700	+ (Bertambah)

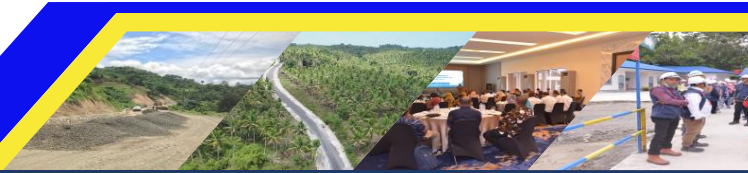
Sumber: Data Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus berupa sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki



karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan terhadap publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel II. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	63,93	$\frac{\text{Jumlah Panjang Jalan Mantap (Baik + Sedang) Provinsi tahun-n}}{\text{Jumlah Total Panjang Jalan Provinsi}} \times 100\%$	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG BADAN PUSAT STATISTIK 2. PROVINSI SULAWESI TENGAH	1. Bidang Jalan dan Jembatan 2. Bidang Bina Teknik 3. UPT Laboratorium
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	Indeks Penyelenggaraan Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah	1,00	$\frac{\text{Capaian 14 Jenis Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi cakupan Provinsi tahun-n}}{\text{Target 14 Jenis Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi cakupan Provinsi Akhir Periode Renstra}}$	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG (Aplikasi SIPJAKI)	Bidang Bina Jasa Konstruksi
3	Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	76,4	$\frac{\text{Capaian Pelaksanaan Indikasi Program pada RTRW Provinsi Sulawesi Tengah tahun-n}}{\text{Target Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang dalam Indikasi Program pada RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Akhir Periode Renstra}} \times 100 \%$	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	Bidang Penataan Ruang

Palu, Maret 2024

Mengetahui,
KEPALA
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. H. FAIDUL KETENG, S.T., M.Si., M.T.
NIP. 19770103 200012 1 002

Sumber : Kertas kerja LAKIP/LKJPD 2024

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu, PK juga dimaksudkan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta sebagai tolok ukur evaluasi kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaraannya. Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) yang disajikan sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. FAIDUL KETENG, S.T., M.Si., M.T.**
 Jabatan : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
 Selanjutnya di sebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. RUSDY MASTURA**
 Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
 Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama Berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah daerah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua
 Gubernur Sulawesi Tengah

H. RUSDY MASTURA

Pihak Pertama
 Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. H. FAIDUL KETENG, S.T., M.Si., M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19770103 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Kemantapan Jalan Provinsi	63.93
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengembangan jasa Konstruksi Daerah	Indeks Penyelenggaraan Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah	1.00
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	76.40

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Jalan	Rp. 376.937.182.045	DAK = Rp. 43.022.615.000
2. Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 1.612.829.450	
3. Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.635.354.125	

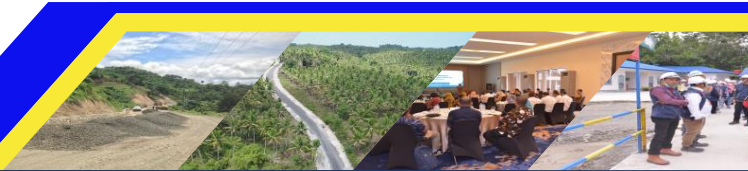
Palu, 13 Februari 2024

Pihak Kedua
 Gubernur Sulawesi Tengah

H. RUSDY MASTURA

Pihak Pertama
 Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. H. FAIDUL KETENG, S.T., M.Si., M.T.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19770103 200012 1 002



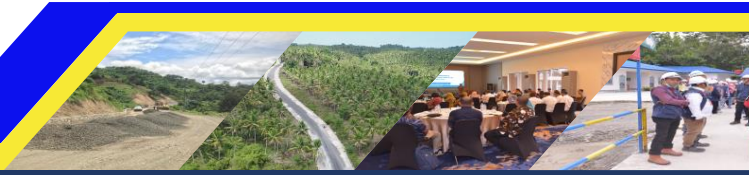
Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Kemantapan Jalan Provinsi	63,93
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	1.00
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	76,40

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 376.937.182,045	DAK Rp, 43.022.615.000
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 1.612.829.450	
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.635.354.125	

Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 3 Program Utama, 11 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan, dengan beberapa rincian sebagai berikut:

- 1) **Program Penyelenggaraan Jalan**, dengan sasaran meningkatnya dan kuantitas infrastruktur jalan. Untuk mencapai sasaran program, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) Penyelenggaraan Jalan Provinsi; Dan Mempunyai 9 Sub Kegiatan (Perencanaan) Antara Lain: (1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; (2) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan; (3) Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi; (4) Penggantian Jembatan; (5) Pembangunan Jalan; (6) Pemeliharaan Rutin Jalan; (7) Rekonstruksi Jalan; (8) Pemeliharaan Berkala Jalan; (9) Pemeliharaan Rutin Jembatan;
- 2) **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**, dengan sasaran meningkatnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk mencapai sasaran program, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; memiliki 1 sub bagian antara lain : (1) Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi.
2) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi; Memiliki 4 sub bagian antara lain : (1) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli; (2) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli; (3) Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli. (4) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi;



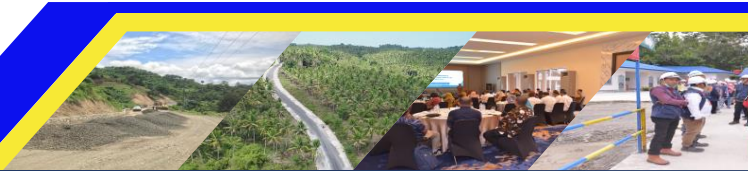
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi; Memiliki 2 sub bagian antara lain : (1) Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi; (2) Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah.
- 3) **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**, dengan sasaran meningkatnya pelaksanaan Penataan Ruang. Untuk mencapai sasaran program, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi; dengan memiliki 1 Sub Kegiatan Yaitu : (1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi; memiliki 1 sub kegiatan yaitu : (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang; 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang; dengan memiliki 2 Sub Kegiatan Yaitu : (1) Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota; (2) Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang. 4) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi; dengan memiliki 2 Sub Kegiatan Yaitu : (1) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang; (2) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang. 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi; dengan memiliki 1 Sub Kegiatan Yaitu : (1) Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal. 6) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi; dengan memiliki 2 Sub Kegiatan Yaitu : (1) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang; (2) Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat. 7) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi; dengan memiliki 1 Sub Kegiatan Yaitu : (1) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja
- Analisis Sumber Daya & Realisasi Anggaran
- Inovasi
- Penghargaan



Dinas Bina Marga dan
Penataan Provinsi Sulawesi
Tengah



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

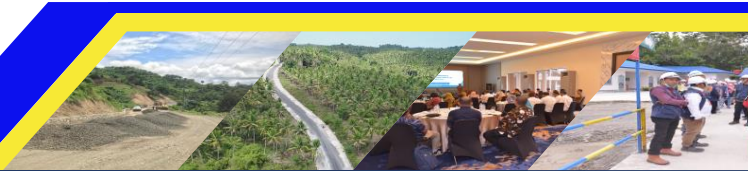
Akuntabilitas kinerja adalah suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan. Akuntabilitas kinerja juga dapat diartikan sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pemantauan kinerja organisasi secara berkala melalui pengukuran pencapaian Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas BMPR Tahun 2021-2026. Kinerja Dinas BMPR Tahun 2024 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan dalam PK (Perjanjian Kinerja) Tahun 2024 pada seluruh Sasaran Strategis.

3.1 Capaian Kinerja

Sebagai tindak lanjut Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. Capaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan target dengan realisasi tahun ini
- b. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- c. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- d. Membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi nasional/instansi lain (jika ada)
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penyajian LAKIP tahun ini merupakan bentuk sinkronisasi dari Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, sehingga terdapat beberapa



penyesuaian beberapa Indikator Kinerja Sasaran yang ada didalam dokumen perencanaan atau Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya akan diuraikan capaian setiap sasaran strategis dan indikator kinerja untuk tahun anggaran 2024.

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tahun anggaran 2024 Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 1 Capaian Kinerja Dinas BMPR berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Kemantapan Jalan. Provinsi	63,93	64,98	101,64	Tercapai
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	1.0	1.0	100	Tercapai
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	76,40	76,40	100,00	Tercapai
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					100,547	Tercapai

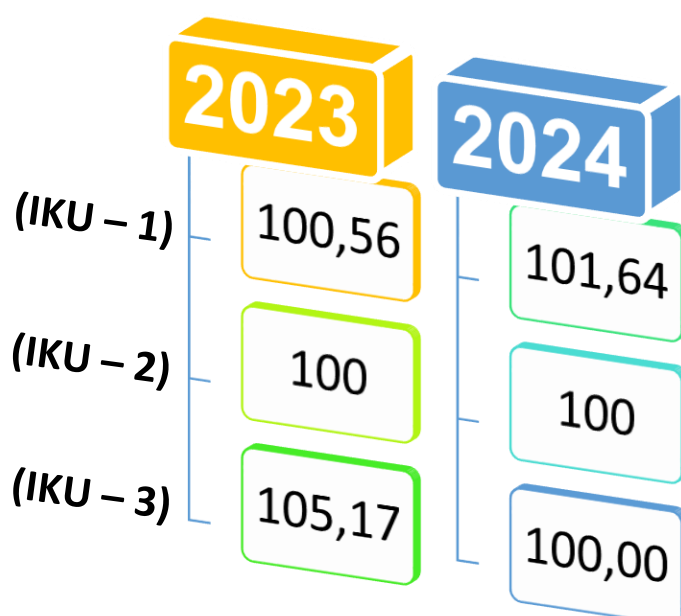
Sumber: Hasil olah Data

Berdasarkan hasil rata-rata pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian IKU sebesar 100.547% dan capaian pendukung lainnya seperti indeks kualitas infrastruktur jalan sebesar 101,64 %, indeks penyelenggaraan jasa konstruksi daerah sebesar 100 %, dan Ketaatan terhadap RTRW sebesar 76,40% yang artinya bahwa pencapaian untuk ditahun 2024 sudah tercapai melebihi target dan bahkan melebihi target.

3.1.2 Perbandingan Kinerja Terhadap Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi keberhasilan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra yakni dengan membandingkan tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Capaian kinerja Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar 100,547% dengan 3 sasaran strategis, dari capaian kinerja tersebut didapatkan kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan pencapaian indikator kinerja tergolong baik dikarenakan tercapainya seluruh target yang ditetapkan ditahun 2024. Adapun

perbandingan kinerja per sasaran strategis tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya dapat di lihat pada gambar dan tabel dibawah ini.

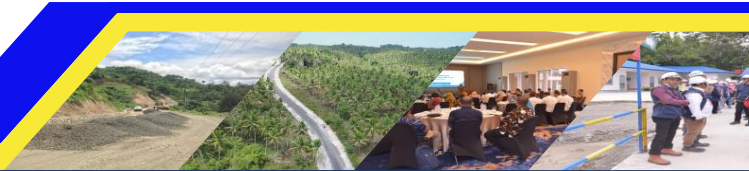


Gambar III. 1 Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Tabel III. 2 Perbandingan Kinerja di Tahun lalu dan Tahun-Tahun Sebelumnya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Kemantapan Jalan Provinsi	64,68	65,04	100,56	63,93	64,98	101,64
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	1.0	1.0	100	1,0	1,0	100
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	65.17	68.54	105,17	74,60	76,40	100,00

Sumber: Hasil olah data



3.1.3 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2021-2026

Pengukuran Kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Proses pengukuran kinerja Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, output (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

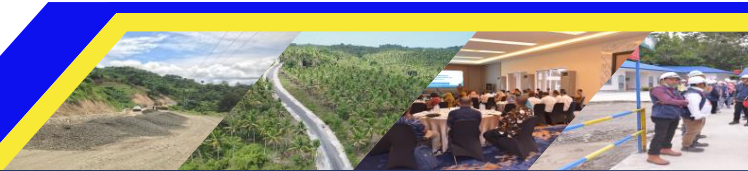
Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain, baik dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah, di mana dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Kemantapan Jalan Provinsi	64,98%	100%	64,98%
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	1.00	1.00	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	76,40%	100%	76,40%

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan tabel III.3 diatas menyimpulkan bahwa Kemantapan Jalan Provinsi, Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah, dan Ketaatan Terhadap RTRW sudah menunjukkan peningkatan dan kemajuan dari target terhadap kinerja target pada RENSTRA.



3.1.4 Perbandingan Kinerja Terhadap Standar Nasional

Desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan dari data kinerja terhadap standar nasional kami mengambil referensi perbandingan kinerja antara Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah terhadap salah satu dinas yang ada di provinsi Gorontalo yang berkaitan dengan kebinamargaan dan penataan ruang yaitu Dinas PUPR Provinsi Gorontalo sebagai tolak ukur untuk jangka pembangunan kepedannya sesuai dengan amanah pemerintah daerah yang tertuang dalam laporan LKJIP/LAKIP pada instansi terkait. Tentunya perbandingan ini memiliki perbedaan yang tentunya sangat signifikan karena pada lingkup Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang merupakan sebuah Dinas yang mengatur tentang infrastruktur jalan, Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah, dan Ketaatan RTRW di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan Pada lingkup Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo Bina Marga dan Penataan Ruang itu merupakan bidang sebagai penunjang Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Tentunya dengan perbedaan susunan organisasi dan tata Kelola tersebut berdampak pada analisis pencapaian antara kedua instansi tersebut dimana Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 3 indikator kinerja utama untuk dicapai yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan, meningkatnya penyelenggaraan jasa konstruksi daerah, dan meningkatnya pengelolaan penataan ruang. Sedangkan pada PUPR Provinsi Gorontalo memiliki 4 sasaran strategis dan 12 indikator kinerja yang terdiri dari beberapa bidang antara lain Sekretariat, Bidang Penataan Ruang dan Pengendalian Infrastruktur, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan UPTD. Sementara pada lingkup PUPR pada provinsi Sulawesi Tengah Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air dulu juga merupakan kesatuan Dinas Sebagai Penunjang Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah seperti pada Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, tentunya perbandingan untuk secara kebinamargaan, kebina jasa konstruksian, dan penataan ruang capaian Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah masih lebih tinggi di banding dengan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo mengingat Bina Marga, Penataan Ruang, dan Jasa Konstruksi merupakan bidang, tentunya memiliki perbedaan dari segi pencapaian karena dari perbandingan tersebut Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi membandingkan kinerja pada bidang Bina Marga, Jasa Konstruksi, dan Penataan Ruang Sebagai tolak ukur kinerja terhadap Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Sebagai analisis untuk perbandingan kinerja terhadap nasional Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Mengambil tidak semua sasaran dan indikator kinerja yang ada di PUPR Provinsi Gorontalo namun hanya mengambil data pencapaian dari 3 bidang yaitu Bidang Penataan Ruang, Bidang Jasa Konstruksi, dan Bidang Bina Marga. Sebagai klarifikasi dan sebagai referensi terhadap analisis capaian antara kedua instansi tersebut mengingat kedua instansi tersebut berbeda provinsi dan memiliki perbedaan dari segi tata Kelola dan susunan organisasi. Untuk itu sebagai ikhtisar atau penjabaran terkait



perbandingan kinerja antara Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Dinas PUPR Provinsi Gorontalo berdasarkan capaian kinerja dan realisasi dapat dilihat pada tabel III.9 berikut :

Tabel III. 4 Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Kemantapan Jalan Provinsi	63,93	64,98	101,64	Tercapai
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	1,0	1,0	100,00	Tercapai
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	76,40	76,40	100,00	Tercapai
Rata – Rata Capaian			100,547			

Sumber : Olah data dan kertas kerja Lakip 2024

Tabel III. 5 Kinerja Dinas PUPR Provinsi Gorontalo tahun 2023

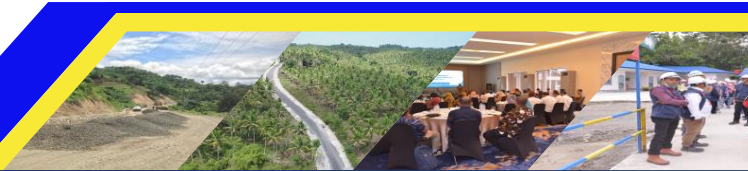
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Membangun Infrastruktur Sumberdaya Air Yang Efisien, Efektif, Produktif dan Ramah Lingkungan	Persentase Kondisi Jalan Provinsi	62,96	68,46	108,73	Sangat Baik
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1,00	1,00	100,00	Sangat Baik



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
3	Meningkatnya Kualitas Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan arahan rencana tata ruang dan penataan bangunan gedung	100	60,05	60,05	Rendah
Rata – Rata Capaian			89,595			

Sumber : olah data dan literatur LKJIP PUPR – PKP Provinsi Gorontalo 2023

Berdasarkan Tabel III.4 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Tabel III.5 Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, bahwa Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo memiliki perbedaan yang signifikan dari tingkat pencapaian dari tahun ke tahun, sebagai ikhtisar Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo memiliki rata – rata capaian yang berbeda, untuk Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dengan tingkat capaian sebesar 100,547 %, sedangkan Dinas PUPR Provinsi Gorontalo memiliki tingkat capaian sebesar 89,595% dimana perbedaan tingkat capaian antara kedua instansi tersebut memiliki deviasi sebesar 10,95 %. Dari deviasi tersebut bisa dijadikan tolak ukur untuk kedepannya sebagai pencapaian untuk jangka pembangunan terhadap instansi terkait, dimana Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah masih jauh lebih tinggi disisi Kebinamargaan dan Penataan Ruang, sedangkan Dinas PUPR Gorontalo pada sisi Kebinamargaan dan Penataan Ruang masih dikategori rendah dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai penjelasan mengapa capaian Dinas PUPR Provinsi Gorontalo masih dikategori rendah dibanding Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, pertama karena perbedaan dari sisi tata Kelola dan struktur organisasi maupun juga visi misi daerah yang beda, kedua lingkup PUPR antar provinsi juga berbeda dimana pada Provinsi Sulawesi Tengah Bina Marga dan Penataan Ruang adalah sebuah instansi yang menunjang kegiatan pemerintah daerah dalam peningkatan infrastruktur Kebinamargaan dan Penataan Ruang dengan kualitas jasa konstruksi, Sedangkan pada lingkup PUPR Provinsi Gorontalo Bina Marga dan Penataan Ruang adalah bidang yang melaksanakan segenap tugas dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan pergub Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja pemerintah daerah provinsi Gorontalo.



3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam meningkatkan capaian kinerja pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dari sisi Infrastruktur berbasis Tata Ruang dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 3 Sasaran Strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024 terhadap analisis keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan

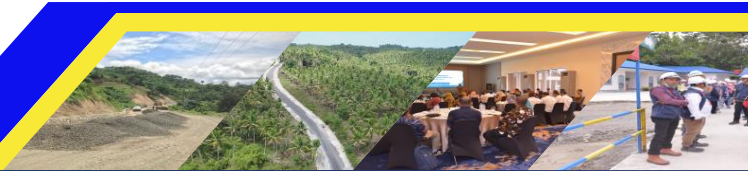
Pada Tahun 2024 panjang jalan yang memenuhi kondisi mantap (jalan baik dan sedang) adalah 1.093,70 Km dari panjang jalan kewenangan Provinsi sebesar 1.683,15 Km. Target kemantapan jalan tahun 2024 sebesar 63,93% dan terealisasi 64,98% dengan capaian indikator ini 103,41% yang artinya kemantapan jalan tahun 2024 menurun sebesar 0,06% dari tahun 2023 dengan nilai 65,04%. Penurunan kemantapan jalan provinsi disebabkan karena ada beberapa ruas jalan himpunan kabupaten di Sulawesi Tengah yang dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi sebanyak 88 ruas dari 80 ruas pada tahun 2023. Tentunya menjadi pengaruh signifikan terhadap kemantapan jalan provinsi dan postur anggaran di tahun 2024. Walaupun demikian Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang provinsi Sulawesi Tengah tetap melakukan efektivitas terhadap paket – paket yang berhubungan dengan capaian kemantapan jalan di tahun yang akan datang terhadap anggaran.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Sampai dengan tahun 2024 telah terlaksana pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibuktikan dengan sertifikat Pelatihan Ahli sebanyak 651 orang atau 0,43 dari target Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026. Pada tahun ini sebanyak 120 peserta yang diikuti dalam pelatihan tenaga ahli, dan sebanyak 120 orang yang berhasil mendapatkan sertifikat tenaga ahli. Capaian ini dapat terlaksana karena pelaksanaan pelatihan tenaga ahli dilakukan secara terbuka dan melibatkan beberapa assesor yang berpengalaman lebih. Kedepannya Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan kuota jumlah tenaga ahli konstruksi yang dilatih/dibimbing, yang pelaksanaannya bekerja sama dengan asosiasi profesi terkait mengingat target di periode Renstra masih sangat jauh.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang

Tahun 2024 bidang Penataan Ruang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan sesuai kewenangannya dengan memfokuskan pada penyempurnaan dan kesesuaian Program Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan sosialisasinya. Persentase kesesuaian terhadap program RTRW sudah mencapai



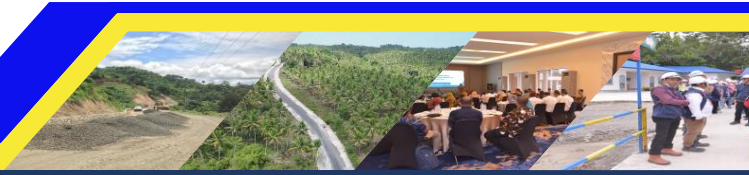
76,40% yang menunjukkan angka target terhadap Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Disamping itu proses Bidang Penataan Ruang berjalan signifikan dalam melakukan sinkronisasi data terkait program kegiatan sektoral terhadap indikasi program kegiatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan amanat dari Permendagri No. 86 Tahun 2017 terkait indikator kinerja dari setiap aspek pada Bidang Penataan Ruang.

Solusi Dalam Peningkatan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulteng untuk peningkatan kinerja. Dinas BMPR Provinsi Sulteng Sasaran telah berupaya menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) segenap PNS, IKI disusun dengan proses *cascading*, mengacu pada IKU organisasi/atasannya sehingga masing-masing pegawai memiliki tanggung jawab dan tugas yang jelas. Selain itu, Sistem Informasi Pemantauan Pekerjaan (SIPP), yang merupakan sistem pelaporan menggunakan teknologi informasi (TI). Salah satu keluaran dari aplikasi ini adalah formulir-formulir sebagaimana formulir pada laporan bulanan standar yang direkomendasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Sulteng. Data pada aplikasi tersebut terintegrasi dengan laporan realisasi keuangan Bendahara OPD. Aplikasi ini berbasis web sehingga laporan dapat dipantau setiap saat. Dengan terpantaunya laporan setiap saat, maka diharapkan dapat diidentifikasi potensi masalah sejak dini, yang kemudian ditentukan tindak lanjutnya sehingga mekanisme penyusunan laporan juga dikembangkan sedemikian hingga melibatkan pejabat struktural.

Disamping pelaporan berbasis TI, juga telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyusunan laporan bulanan seksi/subbagian (pejabat eselon IV). Maksud dibuatnya SOP ini adalah sebagai panduan bagi pejabat eselon IV dalam menyusun laporan bulanan seksi/subbagian, yang mana akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan belanja anggaran pada DPA, sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Laporan Triwulan dan LAKIP OPD. Namun, memperhatikan analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, masih banyak hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik, yaitu:

- 1) Penyempurnaan perencanaan kinerja tahunan menjadi lebih berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis OPD. Hal utama yang pertama-tama perlu dilakukan adalah menetapkan cara/ proses yang tepat dalam rangka mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk penetapan targetnya pada Perjanjian Kinerja (PK) OPD. PK OPD sesungguhnya adalah pernyataan komitmen seluruh personil OPD untuk mencapai suatu target dengan menggunakan anggaran yang telah disepakati. Dengan demikian, seyogyanya ditempuh proses koordinasi bottom-up dengan tetap memperhatikan target-target kinerja yang tertuang pada Rencana Strategis OPD. Bentuk operasionalnya, antara lain menyusun



- Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan sebelum menyusun DPA/DPPA.
- 2) Melalui penyusunan KAK, keluaran setiap kegiatan dapat lebih dahulu diukur keterkaitannya dengan pencapaian hasil program dan sasaran strategis OPD.
 - 3) Menyempurnakan proses cascading berdasarkan arsitektur kinerja sehingga PK OPD bisa di tuangkan ke dalam PK pejabat eselon III dan IV serta ke dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya, sebagai langkah awal adalah membentuk Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (PSTK-SKP), yang selanjutnya melaksanakan tugasnya dengan mempedomani Perka BKN Nomor 3 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai. Tak kalah penting adalah keseragaman cara menilai capaian SKP personil oleh setiap atasan serta penerapan sistem reward and punishment, yang tentunya mempedomani Perka BKN tersebut.
 - 4) Serta Meningkatkan Kerjasama dan koordinasi bersama stakeholder terkait

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

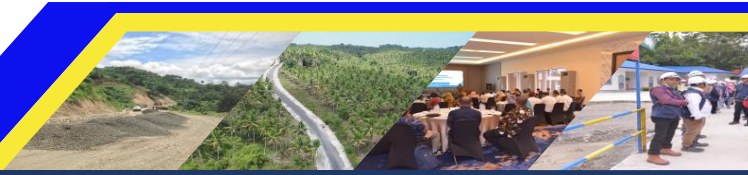
Pengukuran Indikator Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 101.705% yang di dapat dari rata-rata capaian kinerja semua indikator kinerja pada setiap Sasaran Strategis Dinas BMPR. Capaian ini

tentunya tidak terlepas dari 3 Program, 28 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan yang masing-masing dilaksanakan oleh 4 Bidang, 1 UPT dan Sekretariat sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Pada Target Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2021-2026 terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yang mencapai target atau secara keseluruhan melebihi target yang ditetapkan. Adapun rekap terhadap program dan kegiatan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan

Sasaran Strategis 1 (SS-1) merupakan instrumen penting untuk mengakselerasikan perwujudan posisi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang maju. Infrastruktur jalanyang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat meningkatnya kecepatan, waktu tempuh, kebebasan bergerak, kenyamanan dan keselamatan yang dimana parameter-parameter tersebut sangat erat kaitannya dengan kemantapan jalan yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dipilih karena pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Sulawesi Tengah sebagai



pemain utama dalam sektor infrastruktur terus berusaha menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, dengan demikian kualitas maupun kuantitas infrastruktur khususnya infrastruktur jalan harus dibenahi, serta kesinambungan ini juga tetap dijaga dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dikarenakan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan (ekonomi) antarwilayah.

Sasaran Strategis 1 (SS-1) memiliki 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: (1) Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan

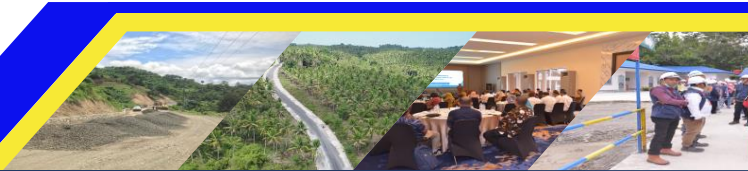
- **Indikator Kinerja Utama (IKU-1): Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi.

Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dimana salah satunya adalah Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan, didalam Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan itu sendiri terdapat 4 indikator program untuk menunjang keberhasilan IKU-1 antara lain:

- 1) Persentase Kemantapan Jalan Provinsi
- 2) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
- 3) Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk
- 4) Persentasi jumlah ruas jalan provinsi yang telah memiliki sertifikat uji laik

Berdasarkan 4 indikator program IKU-1 pada Tahun 2024 Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan persentase kemantapan jalan yg agak menurun sebesar 0,06% dan Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik yang menurun sebesar 6,88 Km dari tahun sebelumnya dengan kondisi 687,49 Km. Kemantapan jalan menjadi menurun karena ada perubahan SK fungsi dan status jalan provinsi dimana beberapa ruas jalan himpunan kabupaten yang naik status menjadi jalan provinsi, Adapun perhitungan terhadap Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan (IKU-1) dapat dilihat pada tabel III.2



Tabel III. 6 Capaian Program Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan (IKU-1)

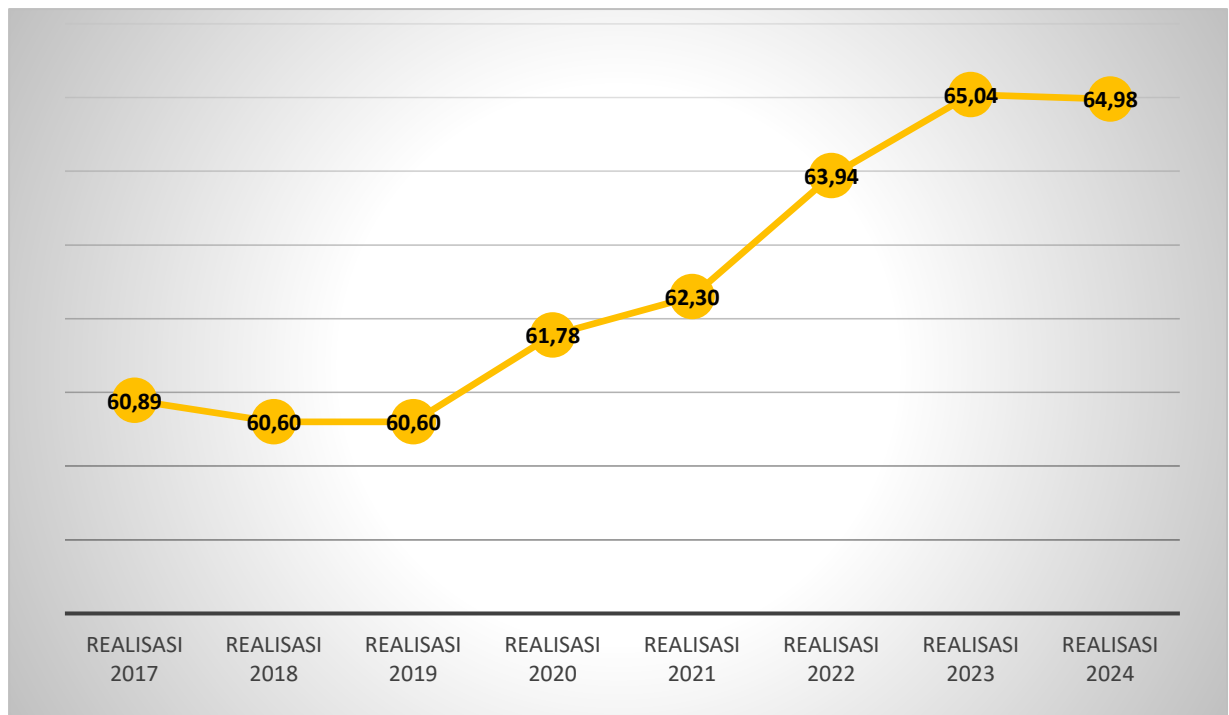
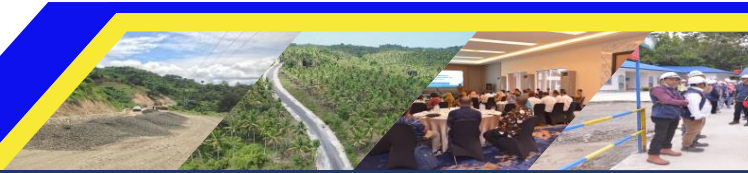
No	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Deviasi
1	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	63,93	64,98	1,05
2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	37,57	40,44	2,87
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk	Indeks	0.52	0.54	0,02
4	Persentase jumlah ruas jalan provinsi yang telah memiliki sertifikat uji laik	Persen	61,25	57.95	-3,30

Sumber: Hasil olah Data

Capaian IKU-1 secara umum didapatkan melalui kegiatan rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan rutin jembatan sepanjang kurang lebih 1.093,70 Km yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ini tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Pencapaian tingkat kemantapan jalan akan mendukung upaya menekan biaya logistik yang saat ini masih tinggi. Berdasarkan nilai TTI kondisi segmen jalan dapat diklasifikasikan menjadi kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi Baik dan Sedang, dan dikategorikan dalam kondisi yang tidak mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat. Pengukuran kemantapan jalan provinsi menggunakan survey kondisi jalan oleh konsultan pelaksana. Oleh karena itu penentuan kondisinya berdasarkan data hasil survei. Survei dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan dengan menggunakan metode TTI.

Treatment Trigger Index (TTI) merupakan nilai pemicu untuk menentukan major works seperti pemeliharaan berkala dan rehabilitasi pada suatu segmen jalan. Berdasarkan analisis nilai TTI diperoleh dari persamaan antara nilai pengukuran ketidakrataan dalam IRI, nilai IRI menjadi faktor konversi TTI terhadap area kerusakan, panjang segmen jalan, lebar segmen jalan. Jika dirumuskan maka Treatment Trigger Indeks sama dengan 100 ditambah sigma akumulasi nilai pengukuran ketidakrataan dalam IRI dikalikan dengan nilai IRI yang menjadi faktor konversi TTI lalu ditambahkan area kerusakan dikalikan dengan nilai bobot kerusakan sesuai dengan literatur/tabel kerusakan jalan terhadap nilai TTI dibagi panjang segmen jalan dan dikurangi nilai bobot kerusakan.



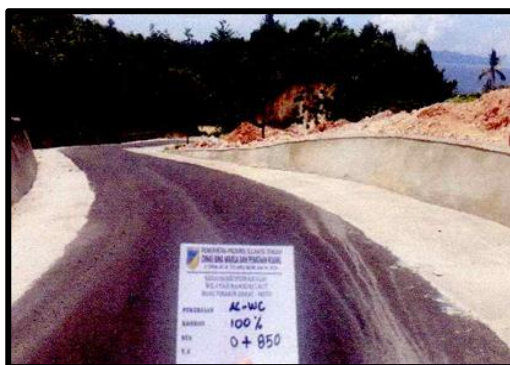
Gambar III. 2 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sulawesi Tengah



Tonusu – Pendolo (MYC)



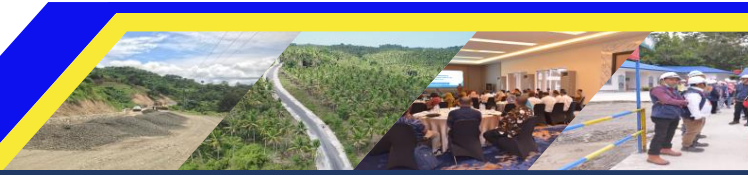
Sp. Buatan – Bilo (DAK)



Tinakin Darat - Mato (DAU)



Siuna - Bualemo (MYC)



Beteleme - Nuha (MYC)



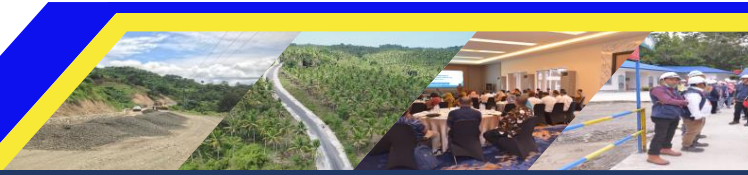
Tonusu - Pendolo (DAK)

Gambar III. 3 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Jaringan Jalan Provinsi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai target Indikator Kinerja yakni “Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan” yaitu 0,88 dan capaian indikator juga masih lumayan melampaui target yang ditetapkan dengan nilai 0,91. Indikator indeks kualitas infrastruktur jalan terbagi menjadi 4 indikator program antara lain persentase kemandapan jalan provinsi, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan persentase jumlah ruas jalan provinsi yang telah memiliki sertifikat uji laik.

Capaian indikator persentase kemandapan jalan sebesar 64,98% dari target 63,93%. Target 64,68% diperoleh dari realisasi persentase kemandapan jalan tahun 2023 sebesar 65,04% dan akumulasi target penanganan jalan tahun 2024 sepanjang 1.076,04 Km (6,97%), Kemandapan jalan tahun 2024 merupakan persentase dari panjang jalan dalam kondisi mantap yaitu 1.093,70 Km dari total panjang jalan provinsi 1.683,15 Km. Keberhasilan capaian indikator pada tahun ini disebabkan oleh paket rekonstruksi, rehabilitasi jalan dan penanganan *Long Segment* yang dapat diselesaikan sehingga memberikan kontribusi kepada kemandapan jalan serta pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin yang dapat menjaga kemandapan jalan sehingga kondisi jalan tidak mengalami penurunan secara signifikan. Untuk indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik telah terealisasi sebesar 40,44% dari target 37,57%, namun perlu diketahui dimana keberhasilan capaian indikator ini hanya tercapai ditahun di 2024, tapi tidak dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan kemandapan jalan dari tahun 2023 sebesar 65,04% menjadi 64,98%. Tapi sejauh ini kemandapan jalan masih dipertahankan agar ditahun yang akan datang tidak terjadi penurunan Kembali dengan melakukan efektivitas kegiatan seperti melakukan pemeliharaan rutin jalan ataupun pemeliharaan berkala jalan. agar dapat menjaga kemandapan jalan dari tahun ke tahun.

Sementara untuk indikator rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk telah tercapai 0,54 dari target 0,52. Nilai tersebut mempunyai deviasi sebesar 0,02 sebagai akibat kenaikan jumlah penduduk Sulawesi Tengah yang cukup besar pada tahun 2024 sebesar 3,219,494 juta penduduk. Namun untuk indikator



persentasi jumlah ruas jalan provinsi yang telah memiliki sertifikat uji laik telah mencapai 57,95% dari target 61,25% yang artinya kemantapan jalan menurun

karena banyak ruas jalan himpunan kabupaten/kota yang dinaikan statusnya menjadi provinsi sebanyak 88 ruas dari SK Gubernur tentang status jalan di tahun 2024, maka dari 88 ruas jalan SK baru 2024 ini yang terealisasi uji laik jalan sampai dengan saat ini sebanyak 51 ruas

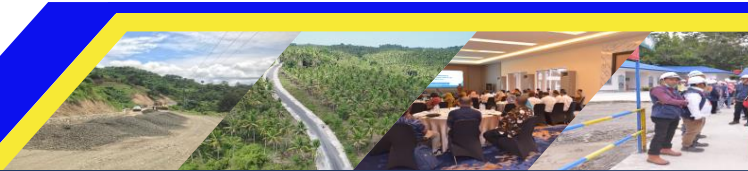
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Potensi pangsa pasar di daerah perlu dipublikasikan, demikian pula informasi penting lainnya tentang jasa konstruksi di daerah. Dengan meningkatnya kemudahan mengakses informasi usaha jasa konstruksi itu, diharapkan dapat meningkatkan volume dan nilai investasi sekaligus meningkatkan transparansi penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah. Penyajian informasi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) merupakan salah satu jenis SPM Bidang PUPR sampai dengan Tahun 2019. Dari tahun 2020 ketersediaan informasi jasa konstruksi melalui system SIPJAKI tidak lagi dimasukkan ke dalam jenis pelayanan dasar. Dengan ditutupnya SIPJAKI ini indikator indeks penyelenggaraan jasa konstruksi tidak dapat terlaksana. Untuk di tahun kemarin, telah dilakukan pengembangan aplikasi SIPJAKI dengan mempedomani permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah daerah yang mana di dalamnya memuat 14 jenis informasi jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Provinsi. Selanjutnya ketersediaan 14 informasi ini yang menjadi indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang termuat dalam renstra periode 2021-2026.

Sasaran Strategis 2 (SS-2) memiliki 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: (1) Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah.

- **Indikator Kinerja Utama (IKU-2): Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah**

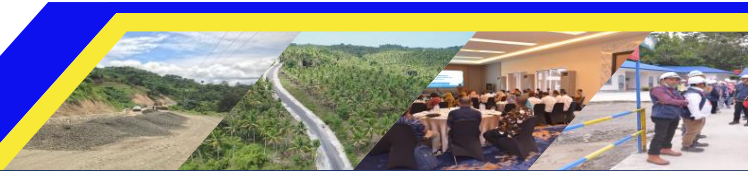
Pada umumnya Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini selanjutnya dapat berimplikasi pada paling tidak tiga hal, yaitu: (1) meningkatnya penghasilan tenaga kerja, akibat peningkatan jumlah produksi dan/atau peningkatan nilai jual jasanya (salary); (2) meningkatnya kapasitas perusahaan, yang akhirnya akan meningkatkan kualifikasi dan/atau pangsa pasarnya; dan (3) meningkatnya daya serap tenaga kerja dan daya saing industri jasa konstruksi daerah. Berangkat dari pemahaman tersebut di atas, Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa berupaya meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi khususnya bersertifikat keahlian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.



Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU-2) tentang Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah yang berimplementasi pada program Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli, yang dimana capaian IKU-2 juga ditentukan berdasarkan 14 Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Provinsi) yang disajikan pada tabel berikut

Tabel III. 7 14 Jenis Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Provinsi)

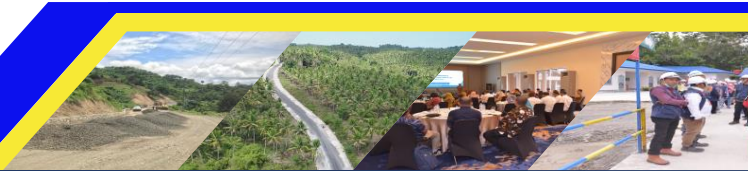
No	Form Data Dan Informasi Jasa Konstruksi (Provinsi)	Keterangan
1	Jumlah pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi;	Ada
2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi;	Ada
3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada
4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data yang termutakhir	Ada
5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Ada
6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Ada
7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada
8	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Ada
9	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	Ada
10	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Ada
11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada
12	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada
13	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada
14	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada



Selanjutnya pada tahun 2024 Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pelatihan tenaga ahli sebanyak 120 orang dan sertifikasi tenaga ahli sebanyak 120. Pengurangan terhadap peserta sertifikasi tentunya tidak terlepas dari grade yang sudah ditentukan dengan pengalaman minimal 2 tahun. Adapun daftar Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli yang di selenggarakan Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah dalam 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel III.4

Tabel III. 8 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli

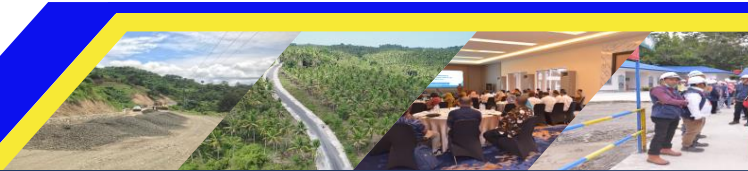
No	Tahun	Keahlian			Jumlah Tenaga Ahli
		Klasifikasi	Sub Klasifikasi	Kompetensi	
1	2024	Manajemen Pelaksana	Ahli Muda K3 Konstruksi	Muda	30
		Manajemen Pelaksana	Ahli Muda Manajemen Konstruksi	Muda	30
		Manajemen Pelaksana	Ahli Muda Manajemen Mutu	Muda	30
		Sipil	Ahli Muda Teknik Jalan	Muda	30
2	2023	Manajemen Pelaksana	Ahli Muda K3 Konstruksi	Muda	31
		Sipil	Ahli Muda Teknik Jembatan	Muda	24
		Manajemen Pelaksana	Ahli Muda Manajemen Konstruksi	Muda	33
		Sipil	Ahli Muda Teknik Jalan	Muda	28
3	2022	Sipil	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Muda	24
		Manajemen Pelaksanaan	Ahli K3 Konstruksi	Muda	60
4	2021	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Manajemen Konstruksi	Muda	26
		Sipil	Ahli Sistem Manajemen Mutu	Muda	25
		Manajemen Pelaksanaan	Ahli K3 Konstruksi	Muda	29
		Sipil	Ahli Teknik Jalan	Muda	19
5	2020	Sipil	Ahli Teknik Jalan	Muda	20
		Manajemen Pelaksanaan	Ahli K3 Konstruksi	Muda	33



No	Tahun	Keahlian			Jumlah Tenaga Ahli
		Klasifikasi	Sub Klasifikasi	Kompetensi	
		Sipil	Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung	Muda	29
6	2019	Sipil	Ahli Teknik Jembatan	Muda	25
		Sipil	Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung	Muda	29
		Sipil	Ahli Sumber Daya Air	Muda	17
7	2018	Sipil	Ahli Teknik Jalan	Muda	24
		Manajemen Pelaksanaan	Ahli K3 Konstruksi	Muda	29
		Sipil	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Muda	26
				Total	651



Gambar III. 4 Kegiatan Pelatihan Ahli Muda Jasa Konstruksi dan Sertifikasi Tenaga Ahli



Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah selaku pelaksana kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah turut andil dalam pelaksanaan pemenuhan sertifikasi tenaga kerja konstruksi pada tahun 2024

dengan hasil output kegiatan berupa tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi. Berdasarkan renstra, pada tahun 2024 Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai target 963 orang dimana angka tersebut belum memenuhi target jika disandingkan dengan total tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi sampai saat ini yang hanya berjumlah 651 orang. Maka dari itu Kedepannya Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan jumlah tenaga ahli konstruksi yang dilatih/dibimbing, yang pelaksanaannya bekerja sama dengan asosiasi profesi terkait. Disamping itu, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan pemerintah daerah kabupaten/kota, tetap wajib dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya. Adapun ringkasan capaian IKU-2 serta program kegiatan sebagaimana tertera dalam Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan dokumen penganggaran tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

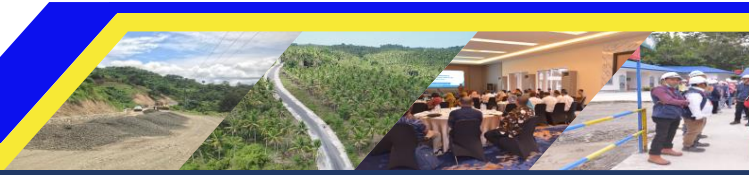
Tabel III. 9 Capaian IKU-2 dan Program Pendukung

Indikator		Target	Realisasi	Capaian
Program	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			100
	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	0,43	0,43	100
Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU-2)	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	1.0	1.0	100.00

Sumber: Hasil olah Data

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang

Peyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar upaya penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifikasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasi antara Struktur Ruang dan Pola Ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang yang Mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.



Pengaturan penataan ruang merupakan sebuah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang. Sementara kegiatan pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan fokus kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

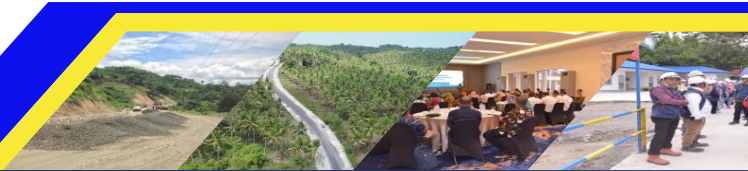
- Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota.
- Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi.
- Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan fasilitasi kerja sama penataan antar kabupaten/kota..

Dalam pembahasan terkait RAPERDA Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banggai tahun 2024 – 2043 bersama Gubernur Sulawesi Tengah, bahwa dalam perda RTRW Provinsi Sulawesi Tengah telah diatur konsep penataan ruang berdasarkan klaster perwilayahan yang terbagi 4 klaster perwilayahan dimana kabupaten banggai masuk dalam dua klaster yaitu klaster wisata bahari dan perikanan Balatoju Bersama Una – una serta klaster industri Morubang Bersama Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara. Dalam pembahasan tersebut harus dipastikan bahwa kebijakan dan arahan strategis Provinsi Sulawesi Tengah terhadap RTRW kabupaten banggai harus sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk penyempurnaan konsep penataan ruang di Kabupaten Banggai.



Gambar III. 5 Pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Adapun Sasaran Strategis 3 (SS-3) memiliki 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: (1) Ketaatan Terhadap RTRW.



• **Indikator Kinerja Utama (IKU-3): Ketaatan Terhadap RTRW**

Realisasi IKU-3 dinyatakan dalam persentase jumlah program yang tersedia terhadap jumlah keseluruhan dokumen penataan ruang yang direncanakan. RTRWP perlu diintegrasikan dengan rencana pembangunan lainnya karena merupakan amanah Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRWP juga berperan memberikan norma, batasan dan arahan terhadap pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di daerah, termasuk mengendalikannya. RTRWP juga menjadi acuan/pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-rencana-program pembangunan di daerah, baik RPJPD dan RPJMD sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. RTRWP nantinya juga perlu ditindaklanjuti dengan rencana detail sebagai dasar bagi daerah dalam memberikan izin-izin pemanfaatan ruang atau kegiatan pembangunan. Sampai dengan tahun 2024 telah terlaksana 68 program utama dari 89 total program utama yang menjadi tolak ukur kesesuaian terhadap Indikasi Program yang tertuang dalam RTRWP. Selain itu berbagai kendala Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan wilayah kabupaten/kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota diantaranya disebabkan oleh faktor; teknik operasional, administratif dan tuntutan perkembangan pasar. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena kurangnya pengendalian terhadap penataan ruang yang ditetapkan. Adapun Ringkasan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-3), serta program pendukung lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel III. 10 Capaian IKU-3 dan Program Pendukung

Indikator		Target	Realisasi	
Indikator Kinerja Utama (IKU-3)	Ketaatan Terhadap RTRW	76,40	76,40%	
Program	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			
	Indikator Kinerja Program	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
Indikator Kinerja Program	Presentasi sosialisaaasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang Penataan Ruang	50,00	45,00	90,00
	Persentase kesesuaian program pemanfaatan ruang	74.93	76,40	101,97
	Persentase penyelesaian sengketa penataan ruang	40.00	40.00	100

Hasil olah Data Kertas kerja 2024

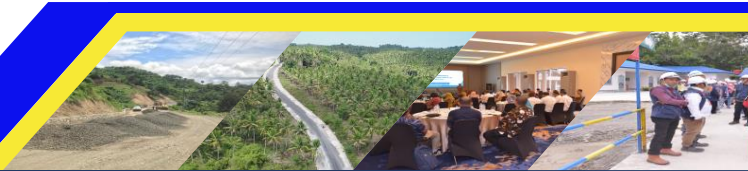


Tabel III. 11 Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Capaian	Sat	
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	99,23	%	
2	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	94,68	%	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	100	%	
			Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100	%	
3	Ketaatan Terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	96,35	%	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	93,92	%	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	97,17	%	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	98,40	%	

Tingkat efesiensi kinerja dapat dievaluasi dengan penilaian relatif, yaitu membandingkan antara hasil yang diterima, dalam hal ini capaian kinerja sasaran strategis (CK), dengan masukan, dalam hal ini realisasi penyerapan anggaran (RA). Suatu proses dapat dikatakan efisien jika rasio CK/RA lebih besar dari satu

(CK/RA > 1). Namun, berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya oleh pihak eksternal bahwa tingkat penyerapan minimum anggaran yang dapat diterima



adalah 80%. Oleh karena itu, penyerapan anggaran yang dapat dikategorikan penghematan dipilih minimal sebesar 80%, dengan tentunya tetap mempertimbangkan kebijakan *self-blocking* oleh pemerintah daerah jika seandainya ada.

Tabel III. 12 Tingkat Efisiensi Tiap Sasaran Strategis pada Pengelolaan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan (SS-1)	101,64	99,23	0.98
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (SS-2)	100	94,68	0.95
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang (SS-3)	100,00	95,88	0.96
Rata Rata		101,14	96.60	0.96

**rata-rata realisasi anggaran hanya dari program utama*

Tingkat efisiensi ditargetkan sebagai kondisi dimana CK minimal 100% dan RA berkisar antara 80% - 100%. Dengan memperhatikan tabel diatas terlihat bahwa seluruh sasaran strategis masih diatas batasan target efisiensi.

3.2 Analisis Sumber Daya & Realisasi Anggaran

Dalam sebuah akuntabilitas tentunya kita harus mengetahui Analisis Sumber Daya dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi semua kegiatan untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, dan Jika berbicara Realisasi Anggaran tentunya tidak lepas dari efisiensi dan juga efektivitas, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Sementara efisiensi anggaran sebagai salah satu dari tujuan penerapan penganggaran berbasis kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (Hasil). Suatu organisasi, Program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *Spending Wisely*.

Analisis Efektivitas

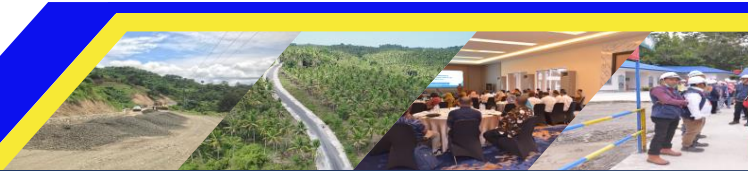
Penyerapan anggaran:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Penyerapan Anggaran

RA : Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja

**Analisis Efisiensi**

Efisiensi anggaran :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } - i / RVK \text{ ke } - i}{PAK \text{ ke } - i / TVK \text{ ke } - i} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan :

PAK : Pagu anggaran

RAK : Realisasi anggaran

TVK : Target keluaran

RAK : Realisasi keluaran

E : Efisiensi

n : jumlah keluaran

Tabel III. 13 Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 2024

Program	Outcome	Keluaran		Anggaran (Jutaan Rupiah)		Efisiensi
		Target (TVK)	Realisasi (RVK)	PAK	RAK	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	63,93	64,98	459,521	455,987	2,37
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	0.43	0.43	1,432,664	1,356,421	5,32



Program	Outcome	Keluaran		Anggaran (Jutaan Rupiah)		Efisiensi
		Target (TVK)	Realisasi (RVK)	PAK	RAK	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentasi sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang Penataan Ruang	50,00	45,00	1.734.014	1.662.590	-6,53
Efisiensi Anggaran						0,4
Efektifitas Penyerapan Anggaran						99,20

Efisiensi pengelolaan anggaran Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah diukur pada tingkat capaian Sasaran Strategis, yang mana di tahun 2024 sudah menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien, sebagaimana disajikan pada tabel diatas.

Sementara itu, dalam rangka penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/LKJPD Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2024, dijabarkan juga terhadap penggunaan dana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna menggerakkan program-program kegiatan pada tahun anggaran 2024 serta dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran. Pagu anggaran Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan adalah Rp 513.553.349.164,11.

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024 ini merupakan upaya untuk pencapaian indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 melalui pencapaian sasaran strategis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan. Akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan bahwa capaian kinerja anggaran adalah 95,26% yang dihitung berdasarkan jumlah realisasi anggaran sebesar Rp 504.886.316.334,47 dibagi dengan jumlah pagu anggaran untuk belanja Langsung setelah perubahan yaitu Rp 513.553.349.164,11. Sumber dana dari semua kegiatan adalah DAU dan DAK T.A 2024. Adapun rincian dari realisasi anggaran tahun 2024 dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

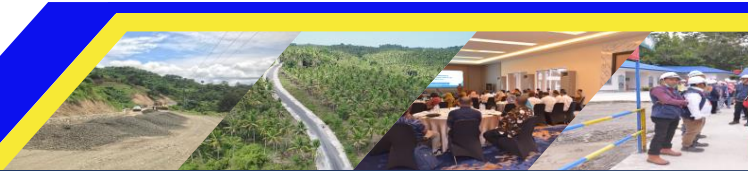


Tabel III. 14 Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2024 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif Dan Transparan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	64,00	Rp 47.845.665.198	-	Rp 42.944.062.848
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kegiatan)	79,45	Rp 1.425.856.235	80,45	Rp 655,912,757
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Rp 1.316.085.585	4	Rp 1.030.213.303
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	Rp 31.130.150	2	Rp 28.031.775
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Rp 37.230.150	3	Rp 34.023.950
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Rp 41.410.350	3	Rp 38.608.950
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	97	Rp 23.190.659.218,66	97	Rp 19.884.451.632



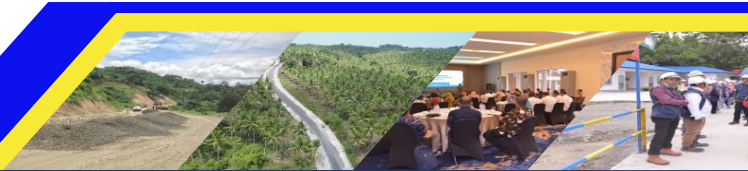
No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2024 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	195	Rp 21.540.806.218,66	195	Rp 18.250.788.632
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Rp 1.569.874.000	1	Rp 1.554.500.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Rp 79.979.000	1	Rp 79.163.000
		Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah (Kegiatan)	4	Rp 696.649.150	4	Rp 695.443.450
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Rp 696.649.150	1	Rp 695.443.450
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (kegiatan)	1	Rp 1.654.140.039	1	Rp 1.594.153.046
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1	Rp 39.998.089	1	Rp 39.424.366
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Rp 87.694.500	1	Rp 67.255.500
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Rp 1.226.980.350	1	Rp 1.215.507.080
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Rp 299.467.100	1	Rp 271.966.100



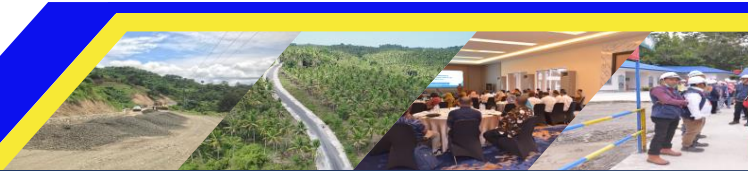
No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2024 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)	1	Rp 9.572.769.985	1	Rp 8.579.624.900
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11	Rp 2.916.725.400	11	Rp 1.957.915.000
		Pengadaan Mebel	104	Rp 314.161.365	104	Rp 312.200.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106	Rp 2.515.913.420	106	Rp 2.493.477.500
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	Rp 3.825.969.800	5	Rp 3.816.032.400
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)	1	Rp 7.499.620.870	1	Rp 7.462.952.142
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Rp 702.148.000	1	Rp 682.386.742
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Rp 46.011.620	1	Rp 44.542.300
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Rp 6.751.461.250	1	Rp 6.736.023.100



No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2024 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)	1	Rp 3.805.969.700	1	Rp 3.596.559.700
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35	Rp 1.261.125.000	35	Rp 1.218.347.600
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	6	Rp 503.422.950	6	Rp 497.565.100
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161	Rp 134.914.900	161	Rp 132.889.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Rp 1.906.506.850	1	Rp 1.747.758.000
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	63,93	Rp 459.521.151.860,45	64,98	Rp 455.987.772.291
		Penyelenggaraan Jalan Provinsi (Kegiatan)	1.085,44	Rp 459.521.151.860,45	1093,70	Rp 455.987.772.291,47
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	56	Rp 18.882.812.999,25	56	Rp 18.730.123.650,50



No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2024 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1643,74	Rp 2.004.061.400	1643,74	Rp 1.988.213.655
		Pembangunan Jalan	50	Rp 80.664.185.651	50,00	Rp 80.633.579.519,27
		Rekonstruksi Jalan	80	Rp 295.864.987.903	80,00	Rp 294.387.644.288,00
		Pemeliharaan Berkala Jalan	5	Rp 30.896.979.300	5	Rp 29.997.443.005
		Pemeliharaan Rutin Jalan	1221,98	Rp 16.153.795.361	1221,98	Rp 15.887.699.025
		Penggantian Jembatan	8	Rp 5.504.417.925	8	Rp 5.445.089.759
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	236	Rp 2.430.395.142	236	Rp 2.396.366.010,62
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1221,98	Rp 239.545.100	1221,98	Rp 237.178.375
		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	165	Rp 6.879.971.079,20	165,00	Rp 6.284.435.004,08



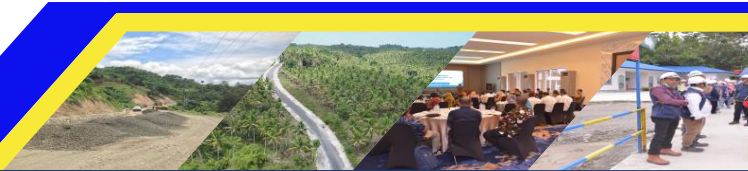
No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2024 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,43	Rp 1.432.664.750,00	0,43	Rp 1.356.421.317,00
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi (Kegiatan)	693	Rp 1.000.918.550	651	Rp 952.524.443
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	120	Rp 578.389.850	120	Rp 554.212.299
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi (Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli)	120	Rp 192.377.750	120	Rp 191.798.685
		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	20	Rp 199.346.600	20	Rp 176.455.309
		Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	120	Rp 30.804.350	120	Rp 30.058.150
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi (Kegiatan)	1	Rp 202.690.950	1	Rp 184.756.436
		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi (Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi)	1	Rp 114.365.550	1	Rp 109.443.807



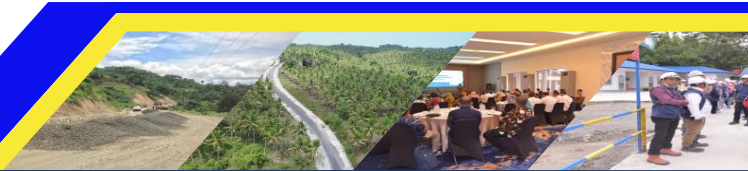
No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2024 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi)	1	Rp 88.325.400	1	Rp 75.312.629
		Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Kegiatan)	1	Rp 229.055.250	1	Rp 219.140.438
		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	1	Rp 229.055.250	20	Rp 219.140.438
	Meningkatnya Pengelolaan dan Penataan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	50,00	Rp 1.734.014.125,00	45,00	Rp 1.662.590.531,00
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi (Kegiatan)	150	Rp 440.287.800	450	Rp 424.197.373
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Rp 137.480.450	1	Rp 131.828.209
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	150	Rp 302.807.350	150	Rp 292.369.164



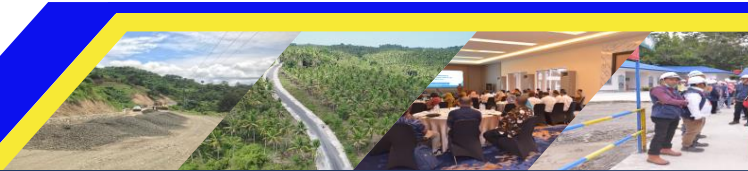
No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2024 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang (kegiatan)	5	Rp 265.187.550	9	Rp 249.071.630
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	1	Rp 58.747.900	1	Rp 56.541.300
		Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1	Rp 206.439.650	1	Rp 192.530.330
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (Provinsi)	30	Rp 458.687.825	119	Rp 445.697.245
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang)	1	Rp 272.640.800	1	Rp 265.452.255
		Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	1	Rp 186.047.025	1	Rp 180.244.990
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi (Kegiatan)	3	Rp 569.850.950	3	Rp 543.624.283
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang (Pemberian Insentif dan /atau disentif nonfiskal)	1	Rp 142.071.050	1	Rp 123.663.248



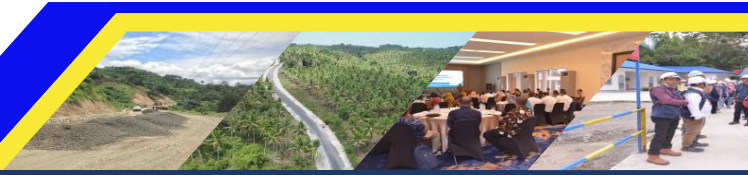
No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2024 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat)	1	Rp 60.178.750	1	Rp 59.934.576
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1	Rp 48.564.800	1	Rp 47.584.800
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Rp 319.036.350	1	Rp 312.441.659
UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan						
	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	60,00	Rp 1.976.171.411	76,31	Rp 1.892.894.064
		Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (Kegiatan)	1	Rp 109.880.000	1	Rp 102.230.698
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50	Rp 53.440.000	50	Rp 52.509.500
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	7	Rp 56.440.000	7	Rp 49.721.198



No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2024 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
		Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	1	Rp 283.396.390	1	Rp 278.848.415
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	1	Rp 31.078.496	1	Rp 30.998.200
		Penyediaan Bahan/Material	1	Rp 131.172.894	1	Rp 129.942.349
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Rp 121.145.000	1	Rp 117.907.866
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)	1	Rp 988.206.680	1	Rp 968.126.407
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kegiatan)	1	Rp 963,417,623	1	Rp 920,715,832
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175	Rp 988.206.680	175	Rp 968.126.407
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kegiatan)	1	Rp 30.231.667	1	Rp 26.674.690



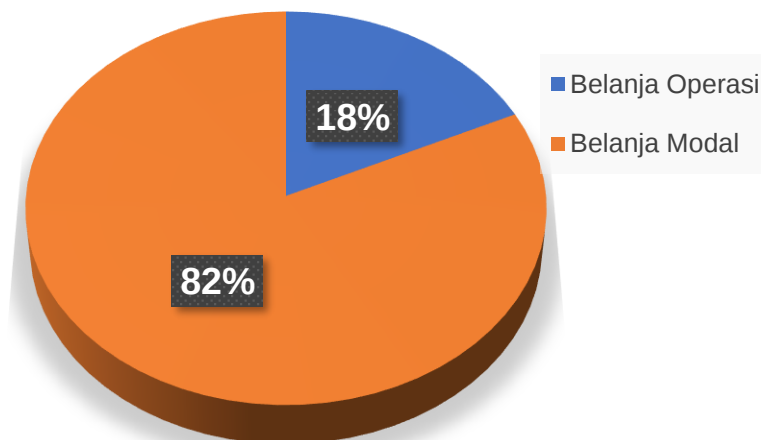
No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2024 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Rp 30.231.667	1	Rp 26.674.690
		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (kegiatan)	1	Rp 564.456.674	1	Rp 517.013.854
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14	Rp 214.900.000	14	Rp 184.445.200
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	190	Rp 170.052.320	190	Rp 153.064.300
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Rp 179.504.354	1	Rp 179.504.354
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	63,93	Rp 1.043.681.820	64,98	Rp 1.042.575.283
		Program Penyelenggaraan Jalan provinsi (Kegiatan)	100,00	Rp 1.043.681.820	1093,70	Rp 1.042.575.283



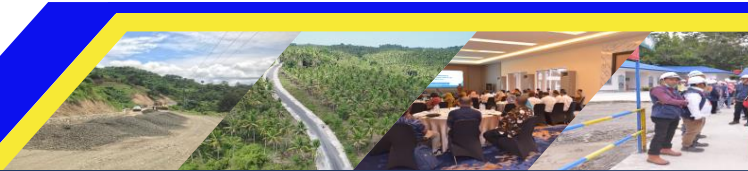
No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD perubahan Provinsi Tahun 2024 (DPA)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024	
1	2	3	4		5	
			K	Rp	K	Rp
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1	Rp 1.043.681.820	1	Rp 1.042.575.283
Jumlah				513.553.349.164,11		504.886.316.334,47

Sumber: Data Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD TW 4 Tahun 2024

Sementara itu, dalam rangka penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2024, dijabarkan juga terhadap penggunaan dana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna menggerakkan program-program kegiatan pada tahun anggaran 2024 serta dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran. Pagu anggaran Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan adalah Rp 513,553,349,164,11.



Gambar III. 6 Diagram Realisasi Anggaran Dinas BMPR



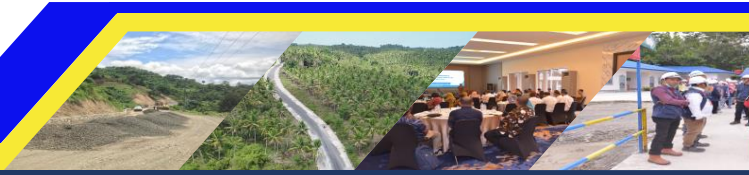
Adapun uraian ringkas pagu anggaran dan realisasi Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah per jenis belanja disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel III. 15 Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Dinas BMPR 2024

Belanja Daerah	DPPA	Realisasi		Silpa	
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Belanja Operasi	96,953,154,572,11	90,739,276,252,20	93.59	6,213,878,320	6,41
Belanja Pegawai	23,056,226,218,66	19,752,588,632,00	85.67	3,303,637,587	14,33
Belanja Barang dan Jasa	73,896,928,353,66	70,986,687,620,20	96,06	2,910,240,733,25	3,94
Belanja Modal	416,600,194,592,00	414,147,040,082,27	99,41	2,453,154,509,73	0,59
Belanja Modal Peralatan & Mesin	4,780,808,865,00	4,733,709,157,00	99,01	47,099,708,00	0,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,438,000,000,00	3,432,638,000,00	99.84	5,362,000,00	0.16
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	408,381,385,727,00	405,980,692,925,00	95,19	2,400,692,802	0,59
Total	513,553,349,164,11	504,886,316,334,47	98,31	8,667,032,830	1,69

Sumber: Hasil olah data

Sebagaimana disajikan pada tabel diatas, penyerapan anggaran Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah di TA 2024 adalah 98,31% dari pagu anggaran pada DPPA, sehingga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 8,667,032,830 (1,69%). Tingkat penyerapan tersebut sebesar 3,05% jika dibanding dengan tingkat penyerapan ditahun 2023, Mempertimbangkan dari jenis belanja yaitu belanja operasi dan belanja modal terlihat bahwa silpa lebih besar disumbangkan dari belanja operasi sebesar 6.41% atau setara 6,2 M. jika diperhatikan lebih rinci lagi bahwa sisa anggaran yang tidak terserap dari belanja operasi sebagian besar berasal dari belanja pegawai. Berbagai kebijakan telah dilakukan demi mencapai peningkatan kinerja penyerapan anggaran, untuk ditahun selanjutnya tidak hanya semata melanjutkan strategi lelang dini paket-paket pekerjaan kontraktual, namun juga senantiasa pemanfaatan monev dinas mulai dari perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan kegiatan, dan penyesuaian belanja pegawai.



3.3 Inovasi

Sebagai badan publik, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik. Hal ini tidak hanya sebatas keterbukaan informasi publik, namun juga kemudahan dalam mengakses informasi yang menuntut inovasi dan kreativitas badan publik. Untuk tahun 2024, Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 2 inovasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum antara lain:

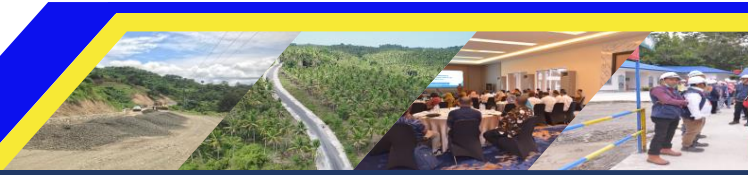


Gambar III. 7 Logo Aplikasi Sistem Informasi Bina Jasa Konstruksi “SIBIJAK”

SI BIJAK

SIBIJAK atau Sistem Informasi Bina Jasa Konstruksi – Sulteng merupakan aplikasi system informasi sederhana berbasis web sebagai bentuk implementasi E-Government, dalam konteks ini termasuk dalam jenis pelayanan publikasi

Sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik khususnya masyarakat jasa konstruksi untuk kemudahan akses memperoleh data/informasi jasa konstruksi kewenangan Provinsi



Gambar III. 8 Logo Aplikasi “SITARU”

SITARU

Sistem Informasi Penataan Ruang (SITARU) dikembangkan oleh Bidang Penataan Ruang pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

SITARU menyajikan informasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara luas. membantu proses sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Sulawesi Tengah.

3.4 Penghargaan

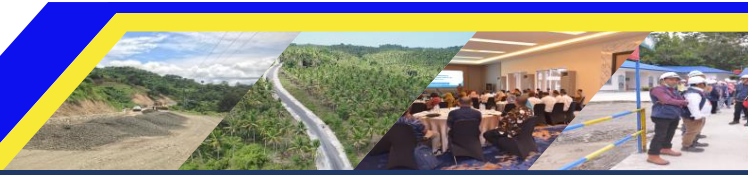
Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu ke-ulungan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, kado, piala, gelar, sertifikat, plaket atau pita. Suatu penghargaan kadang-kadang disertai dengan pemberian hadiah berupa uang seperti Hadiah Nobel untuk kontribusi terhadap masyarakat, dan Hadiah Pulitzer untuk penghargaan bidang literatur. Penghargaan bisa juga diberikan oleh masyarakat karena pencapaian seseorang tanpa hadiah apa-apa. Pada tahun 2023 khususnya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan penghargaan sebagai Juara 1 OPD terbersih Se-Sulawesi Tengah yang di adakan dan diselenggarakan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah (H. Rusdy Mastura). diselenggarakan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah (H. Rusdy Mastura).



Gambar III. 9 Piagam Penghargaan Lomba Kebersihan Lingkungan Se-Sulawesi-Tengah



Gambar III. 10 Piagam Penghargaan Lomba Kebersihan Lingkungan Se-Sulawesi-Tengah pada tahun – tahun sebelumnya



Penghargaan berikut yaitu penghargaan Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi Indonesia SE-SULAWESI Tahun 2024 yang diadakan di Makassar oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI, dalam kompetisi tersebut Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Membawa Provinsi Sulawesi Tengah dengan Meraih juara 3.



Gambar III. 11 Piagam Penghargaan Kompetisi Tenaga Kerja SE-SULAWESI Tahun 2024

Penghargaan Kembali diraih oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar mendapat peringkat 1 atas kinerjanya yaitu "Organisasi Perangkat Daerah yang Membidangi Sub-Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi Terbaik SE-SULAWESI pada kinerjanya di tahun 2023.



Gambar III. 12 Piagam Penghargaan OPD Terbaik yang Membidangi Sub-Urusan Jasa Konstruksi Tingkat Provinsi SE-SULAWESI Tahun 2024

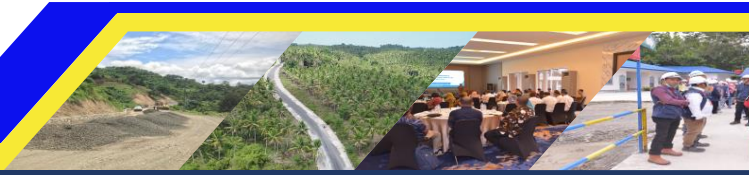
LKJPD 2024

BAB IV PENUTUP

- Kesimpulan terkait capaian kinerja dan langkah tindak lanjut untuk kedepannya



Dinas Bina Marga dan
Penataan Provinsi Sulawesi
Tengah

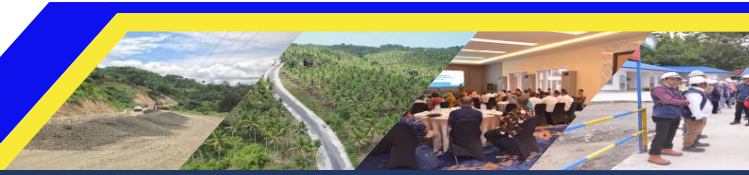


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJPD)/ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Renstra Dinas BMPR Tahun 2021 - 2026. Pada 2024 ini, Laporan Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas BMPR untuk tahun ketiga Renstra Dinas BMPR Tahun 2021 - 2026 sekaligus alat untuk melanjutkan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas BMPR pada tahun sebelumnya.

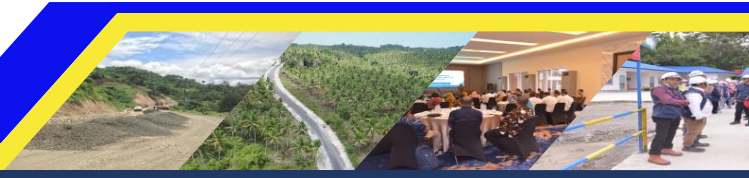
Capaian kinerja Dinas BMPR didukung oleh tiga program utama dan satu program pendukung sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh Kepala Dinas BMPR dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan dokumen Renstra Dinas BMPR 2021 - 2026. Capaian kinerja Dinas BMPR ini diukur berdasarkan pencapaian IKU pada tiga Sasaran Startegis Dinas BMPR yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian PUPR 2021 - 2026. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, diketahui bahwa dari 3 IKU telah tercapai secara keseluruhan pada tahun 2024. Pencapaian ini sebagai hasil dari koordinasi dan komitmen yang terlihat dari kepedulian para pimpinan dan pegawai Dinas BMPR. Proses perencanaan dan persiapan yang matang, seperti terlihat dari adanya pelaksanaan kegiatan RAPIM TEPR, Rapat Internal, serta Raker Pimpinan terkait anggaran, juga turut mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur oleh Dinas BMPR. Tidak cukup hanya pada proses perencanaan dan persiapan, keberhasilan pencapaian ini juga disebabkan oleh adanya kegiatan pemantauan yang dilakukan melalui Monitoring dan Evaluasi setiap kegiatan yang ada. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja pada tahun 2024 secara keseluruhan telah tercapai, jika disandingkan dengan Renstra Dinas BMPR Tahun 2021 – 2026 nilai dari indeks kebinamargaan di tahun keempat periode berjalan telah menyentuh angka 0,91 yang mana nilai tersebut belum mencapai target dengan selisih capaian 0,02 dari 0,93 untuk capaian indeks kebinamargaan yang disebabkan oleh menurunnya beberapa capaian salah satunya kemantapan jalan provinsi yang ditahun sebelumnya yaitu sekitar 65,04% terhadap tahun 2024 menurun sekitar 0,06% atau sekitar 64,98%. Tentunya dengan perbedaan nilai indeks tersebut mempengaruhi akseibilitas dan capaian indeks kebinamargaan ditahun 2024. Sebagai tolak ukur untuk kedepannya demi mencapai target kinerja terhadap RENSTRA 2021 – 2026 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi akan melakukan :

1. Percepatan pelaksanaan tender dan kegiatan pada tahun berikutnya, dengan percepatan pelaksanaan tender maka diharapkan pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat terkait dengan sumber pembiayaan dalam rangka mendorong upaya percepatan pembangunan.

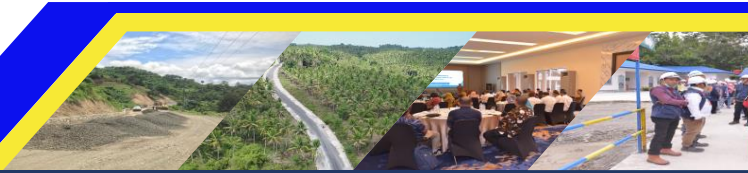


3. Optimalisasi penggunaan dana untuk mempertahankan fungsi jalan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran pergerakan arus orang, barang dan jasa.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi lain terkait Infrastruktur Daerah.
5. Memaksimalkan peran pengendalian pekerjaan utamanya pengendalian terhadap waktu pelaksanaan yang ada, pengendalian mutu pelaksanaan, manajemen sumber daya dan peralatan.

Akhirnya, dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas BMPR Provinsi Sulteng di tahun 2024, sehingga dapat memberikan masukan untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang, sekaligus sebagai motivasi untuk lebih bekerja keras, lebih bergerak cepat, dan bertindak lebih tepat.



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimaturungprov.sulteng@gmail.com Website : bimaturung.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
TAHUN 2024

SEKRETARIAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Rusmiadi, S.T., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.**
Jabatan : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.

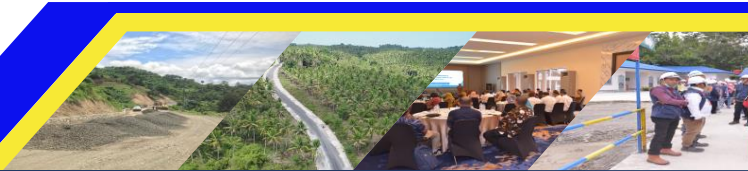
Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Rusmiadi, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780517 200502 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19770103 200012 1 002

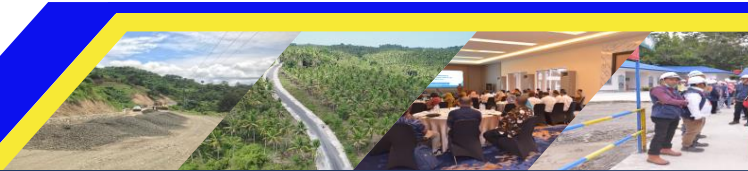


**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
TAHUN 2024
SEKRETARIAT**

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan	Nilai SAKIP Perangkat	79.45%
2.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	60 Indeks
3.	Terwujudnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Perangkat Daerah	Indeks SPBE Perangkat Daerah	60 Indeks
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	60 Indeks
5.	Meningkatnya Pengawasan KeArsipan Internal Perangkat Daerah	Tingkat Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah	62%
6.	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Tindak Lanjut Hasil Penelitian BPK dan APIP ASN Perangkat Daerah	60%
7.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	60 Indeks
8	Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Perangkat Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Perangkat Daerah	60 Indeks



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimaturung.prov.sulteng@gmail.com Website : bimaturung.sultengprov.go.id

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan 1. Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 45.755.122.442	

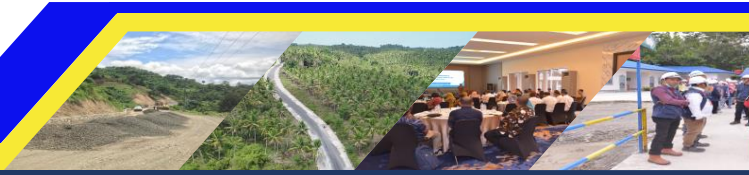
Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi
Sulawesi Tengah

Dr. Rusmiadi, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691022 198903 1 006

Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19770103 200012 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SRI RAHAYU AKBAR, S.Sos**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. RUSMIADI, S.T., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, April 2024
Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah


Dr. Rusmiadi, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780517 200502 1 005


Sri Rahayu Akbar, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19730817 199303 2 011



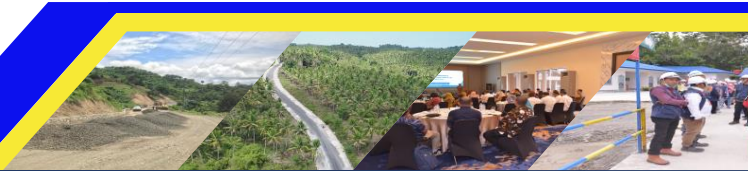
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Tindak Lanjut Hasil Penelitian BPK dan APIP ASN Perangkat Daerah	1 Dokumen
	Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	195 Orang
	Tersusunnya Neraca Aset	Jumlah Aset yang Tercatat	1 Dokumen
	Terpenuhinya Laporan Akuntansi dan Keuangan yang Tepat Waktu	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	1 Laporan
	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah	1 Laporan
2	Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Perangkat Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Jasa (PBJ) Perangkat Daerah	1 Laporan
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang diadakan	4 Unit
	Tersedianya Mebel Kantor	Jumlah Mebel yang diadakan	9 Paket
	Tersedianya Peralatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Jumlah Alat Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	23 Unit
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Unit
	Tepantaunya Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian Barang Milik Daerah	35 Unit
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	60%
	Terpeliharanya Gedung Kantor	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	1 Unit



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
 Email : bimaturung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimaturung.sultengprov.go.id

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 21.552.271.343	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 1.270.956.900	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 51.071.650	

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Anggaran	Keterangan
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 1.828.099.800	
2.	Pengadaan Mebel	Rp. 198.678.035	
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 1.402.519.560	
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 3.789.969.800	
5.	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Terpelihara Dengan Baik	Rp. 852.725.000	

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Anggaran	Keterangan
1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 1.777.555.704	

Sekretaris Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

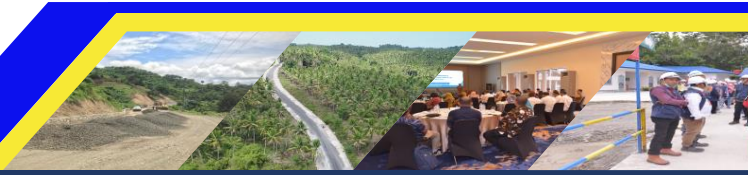
Dr. Rusmiadi, S.T., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19780517 200502 1 005

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Sri Rahayu Akbar, S.Sos

Penata Tingkat I
NIP. 19730817 199303 2 011



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimaturung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimaturung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Suriyanto, S.Sos**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Selanjutnya
disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Rusmiadi, S.T., M.Si**

Jabatan : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Selaku
atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Rusmiadi, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780517 200502 1 005

Suriyanto, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19710502 199203 1 010



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax (0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Hukum Perangkat Daerah	60%
	Terpenuhinya Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	Jumlah Unit Kerja yang Terpenuhinya Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	1 Paket
	Tersedianya Bahan Bacaan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	1 Dokumen
	Tertanganinya Permohonan Layanan Kepegawaian	Jumlah ASN Yang Tertangani Layanan Kepegawaian, jumlah ASN Yang terlatih	1 Laporan
2	Terwujudnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Perangkat Daerah	Indeks SPBE Perangkat Daerah	60%
	Tertanganinya Permohonan Data dan Informasi	Jumlah Dokumen Permohonan Data dan Informasi yang Tertangani	1 Dokumen
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	60%
	Tersedianya Layanan Internet, Layanan Telpon, Layanan Listrik, dan Kebutuhan Air	Jumlah Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Layanan Internet, Layanan Telepon, Layanan Listrik dan Kebutuhan Layanan Air	1 Laporan
	Terpeliharanya Alat Besar	Jumlah Alat Besar Yang Terpelihara Dan Perizinan	6 Unit
	Terpeliharanya Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	161 Unit
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	60%
	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan	1 Laporan

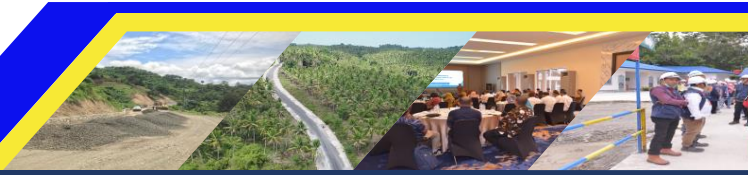


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
 Email : bimaturung_prov.sulteng@gmail.com Website : bimaturung.sultengprov.go.id

5	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Tingkat Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah	62%
	Tersedianya Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan Kantor. Dan Tersedianya Tenaga Pendukung, Tenaga Listrik dan Tenaga Ahli	Jumlah Unit Kerja yang Terlayani Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan Kantor, dan Tersedianya Tenaga Teknik dan Tenaga Ahli	1 Laporan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 34.999.499	
2.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 27.695.000	
3.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 916.700.350	
Kegiatan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah		Anggaran	Keterangan
1.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 147.230.100	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 703.160.000	
2.	Alat Besar yang Dipelihara dan Perizinan	Rp. 484.367.100	
3.	Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Rp. 117.650.100	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 24.817.370	



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov.sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

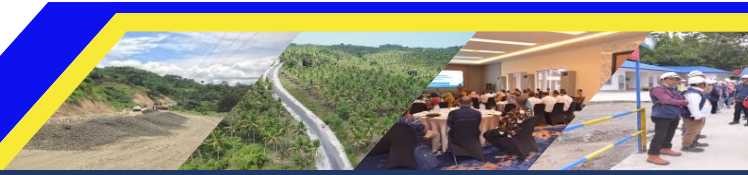
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 6.458.661.250	

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian
Kepegawaian dan Umum
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Rusmiadi, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780517 200502 1 005

Suriyanto, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19710502 199203 1 010



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax (0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimamaraung.prov.sulteng@gmail.com Website : bimamaraung.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fikky Zachry, S.T., M.T**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Rusmiadi, S.T., M.Si**
Jabatan : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Sekretaris Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Program Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Rusmiadi, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780517 200502 1 005

Fikky Zachry, S.T., M.T
Penata
NIP. 19850816 201503 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114

Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

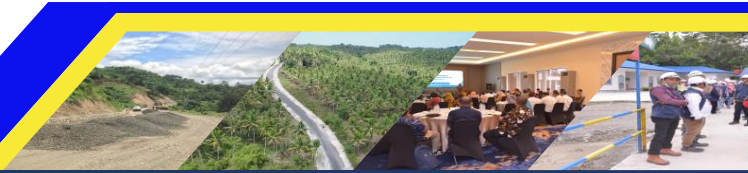
**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,45%
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
	Tersedianya Dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	2 Dokumen
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Keterangan

	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.218.182.250	
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 31.130.150	
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 37.230.150	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 41.410.350

Sekretaris Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Sub Bagian Program Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Rusmiadi, S.T., M.Si

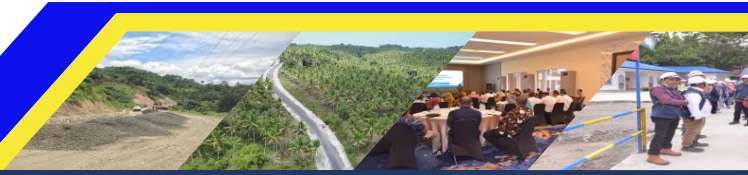
Pembina Tingkat I

NIP. 19780517 200502 1 005

Fikky Zachry, S.T., M.T

Penata

NIP. 19850816 201503 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
TAHUN 2024**

BIDANG BINA TEKNIK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Herawaty Buna, S.T., M.T**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Teknik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.**
Jabatan : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

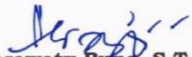
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.

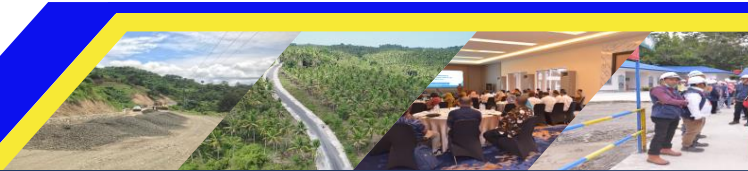
Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Bina Teknik
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi
Sulawesi Tengah


Herawaty Buna, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19680914 199703 2 003


Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19770103 200012 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

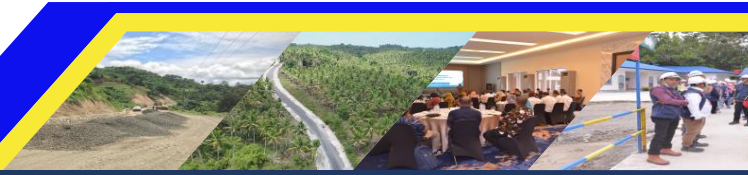
**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
TAHUN 2024
BIDANG BINA TEKNIK**

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Jalan Provinsi	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Jalan Provinsi	100%
Jabatan Fungsional			
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis jalan dan Jembatan (DED), Tersusunnya Studi kelayakan (FS) Jalan dan Jembatan.	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan (DED), Jumlah Dokumen Studi Kelayakan (FS) Jalan dan Jembatan.	4 Dokumen
2.	Tersusunnya Database Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Database Jalan dan Jembatan	1 Dokumen
3.	Terpantaunya Aktifitas Konsultan Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Aktifitas Pengawasan	159 Km

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Jalan	Rp 26.289.997.238	

***Tugas & Fungsi Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan & Jembatan**

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi		
1. Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp 11.111.196.750	
2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp 1.887.324.200	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114

Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

- Pengawasan Teknis
3. Penyelenggaraan Rp 7.047.836.625
- Jalan/jembatan

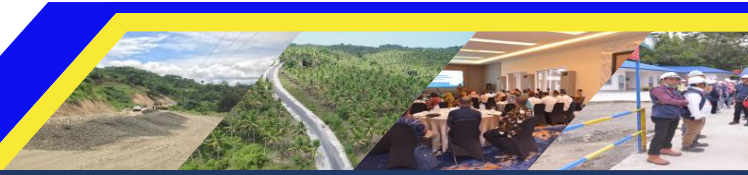
Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Bina Teknik
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi
Sulawesi Tengah

Herawaty Buna, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19680914 199703 2 003

Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19770103 200012 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov.sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG BINA TEKNIK
SEKSI PEMBINAAN DAN FASILITASI JALAN KABUPATEN/KOTA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Moh. Ridsan Lede, AH.T**
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Jalan Kabupaten/Kota

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Herawaty Buna, S.T., M.T**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Teknik

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

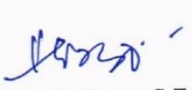
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Bina Teknik
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pembinaan dan Fasilitasi
Jalan Kabupaten/Kota Dinas Bina Marga
dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah


Herawaty Buna, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19680914 199703 2 003


Moh. Ridsan Lede, AH.T
Penata Tingkat I
NIP. 19680919 199704 1 009



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114

Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG BINA TEKNIK
SEKSI PEMBINAAN DAN FASILITASI JALAN KABUPATEN/KOTA**

Program Penyelenggaraan Jalan

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Jalan dan Jembatan	100%
1	Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Jalan & Jembatan Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang terbina dan terfasilitasi	1 Km
2	Tersedianya Rekomendasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

1. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan
2. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan / Jembatan

Anggaran

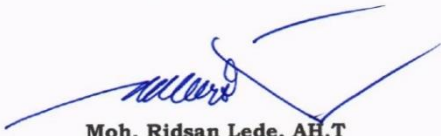
Rp. 239.545.100

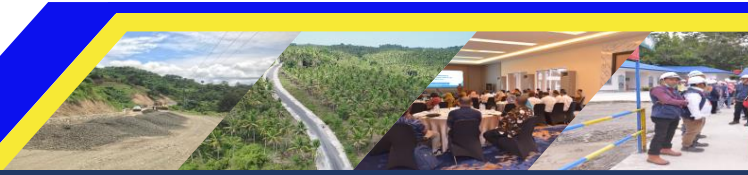
Keterangan

Kepala Bidang Bina Teknik
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Seksi Pembinaan dan Fasilitasi
Jalan Kabupaten/Kota Dinas Bina
Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah


Herawaty Buna, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19680914 199703 2 003


Moh. Ridsan Lede, AH.T
Penata Tingkat I
NIP. 19680919 199704 1 009



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
 Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG BINA TEKNIK
SEKSI LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN JALAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Monarsih, S.T., M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Herawaty Buna, S.T., M.T.**

Jabatan : Kepala Bidang Bina Teknik

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
 Bv

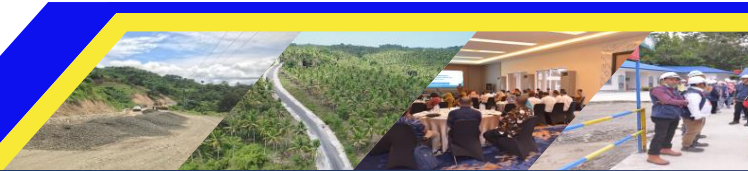
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang Bina Teknik
 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
 Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, April 2024
 Pihak Pertama,
 Kepala Seksi Lingkungan
 dan Keselamatan Jalan
 Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
 Provinsi Sulawesi Tengah


Herawaty Buna, S.T., M.T
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680914 199703 2 003


Monarsih, S.T., M.Si
 Pembina
 NIP. 19760902 200112 2 004



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG BINA TEKNIK
SEKSI LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN JALAN**

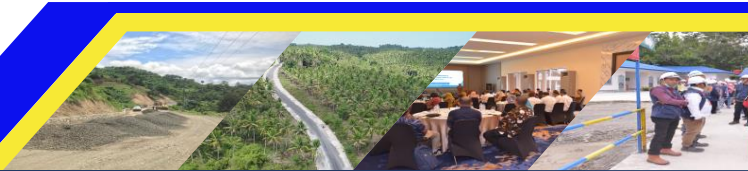
Program Penyelenggaraan Jalan

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Yang Sesuai Dengan Standar	100%
1	Tersusunnya Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	Jumlah Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	7 Dokumen
2	Tersusunnya Laik Fungsi Jalan	Jumlah Sertifikat Laik Fungsi	5 Sertifikat

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Anggaran	Keterangan
1. Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp. 6.004.094.563	
Kepala Bidang Bina Teknik Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	Kepala Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	


Herawaty Buna, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19680914 199703 2 003


Monarsih, S.T., M.Si
Pembina
NIP. 19760902 200112 2 004



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114

Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
TAHUN 2024**

BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. Asbudianto, S.T., M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.**
Jabatan : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.

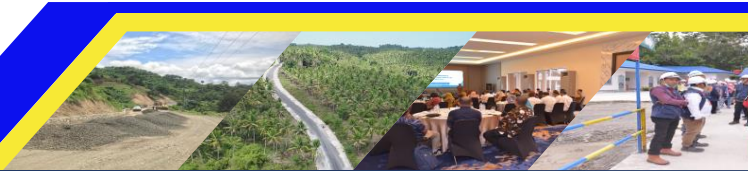
Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi
Sulawesi Tengah


Ir. Asbudianto, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700921 199403 1 003


Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19770103 200012 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
TAHUN 2024**

BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Peran Jalan dalam Meningkatkan Pengembangan Wilayah	Persentase Aksesibilitas Menuju Klaster Perwilayahan	66.03%
1.	Meningkatnya Kondisi Jalan Baik	Persentase Jalan Baik	66.03%

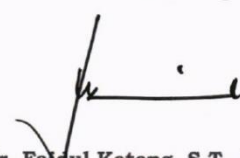
Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Rp 349.864.758.006	

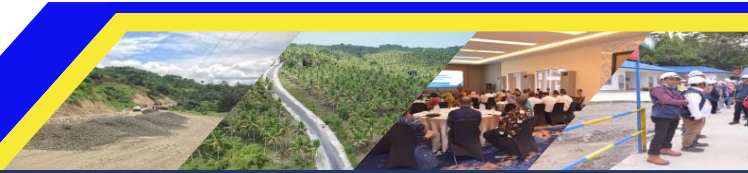
Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi
Sulawesi Tengah


Ir. Asbudianto, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700921 199403 1 003


Dr. Fauzul Keteng, S.T., M.Si., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19770103 200012 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung.prov.sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI JALAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mamat Zeni Prasetya, S.T**

Jabatan : Kepala Seksi Jalan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. Asbudianto, S.T., M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

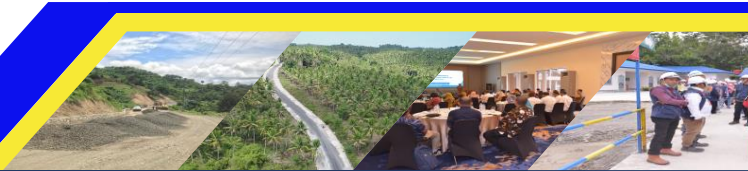
Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Jalan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah


Ir. Asbudianto, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700921 199403 1 003


Mamat Zeni Prasetya, S.T
Penata Tingkat I
NIP. 19690625 200112 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI JALAN**

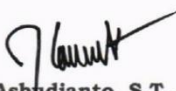
Program Penyelenggaraan Jalan

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kondisi Jalan Baik	Persentase Kondisi Jalan Baik	66,03%
1.	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Di Rekonstruksi	70,31 Km
2.	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Pelihara Secara Rutin	410,61 Km
3.	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	1,13 Km
4.	Terlaksananya Perbanggunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	42,55 Km

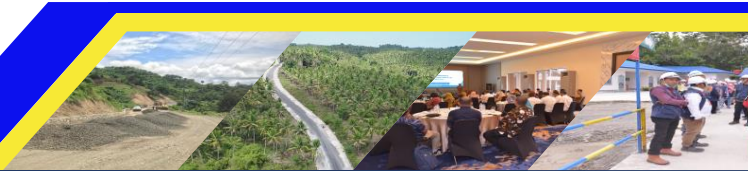
Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Anggaran	Keterangan
1. Rekonstruksi Jalan	Rp. 275.002.211.188	
2. Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp. 15.898.288.361	
3. Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp. 5.610.000.300	
4. Pembangunan Jalan	Rp. 48.593.192.865	

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Seksi Jalan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah


Ir. Asbudianto, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700921 199403 1 003


Mamat Zeni Prasetya, S.T
Penata Tingkat I
NIP. 19690625 200112 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114

Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI JEMBATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Syaiful Anwar, S.T., M.Si**

Jabatan : Kepala Seksi Jembatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. Asbudianto, S.T., M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Jalan dan Jembatan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

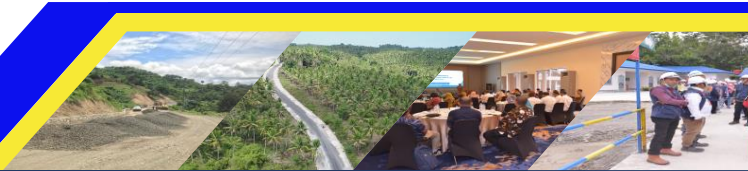
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Jembatan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah


Ir. Asbudianto, S.T., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19700921 199403 1 003


Ir. Syaiful Anwar, S.T., M.Si

Pembina
NIP. 19760419 200312 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
SEKSI JEMBATAN**

Program Penyelenggaraan Jalan

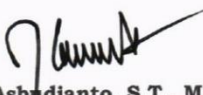
No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kondisi Jalan Baik	Persentase Kondisi Jalan Baik	66,03%
1	Terlaksananya Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang diganti	184,2 Jembatan
2	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang dipelihara secara rutin	235 Jembatan

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi

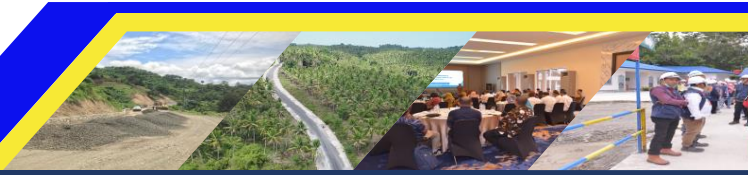
	Anggaran	Keterangan
1. Penggantian Jembatan	Rp. 2.462.650.150	
2. Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp. 2.298.415.142	

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Seksi Jembatan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah


Ir. Asbudianto, S.T., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19700921 199403 1 003


Ir. Syaiful Anwar, S.T., M.Si
 Pembina
 NIP. 19760419 200312 1 006



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax (0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114

Email : bimatarungprov.sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
TAHUN 2024**

BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Agus Nain Sahabat, S.T., M.T**

Jabatan : Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.**

Jabatan : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.

Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Agus Nain Sahabat, S.T., M.T

Pembina Tingkat I

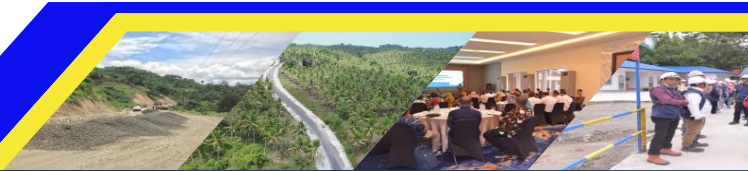
NIP. 19690808 199803 1 009

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19770103 200012 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
TAHUN 2024
BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI**

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	45,32%
Jabatan Fungsional			
1	Terlaksananya Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Konstruksi Yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	20 Lembaga

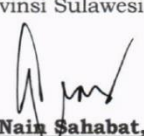
Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 1.612.829.450	

***Tugas & Fungsi Pengawasan Jasa Konstruksi**

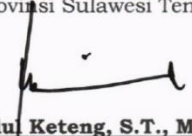
Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Rp. 268.718.950	

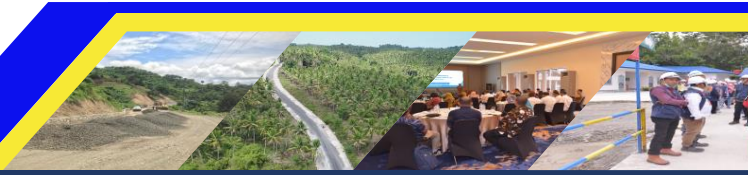
Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah


Agus Nain Sahabat, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19690808 199803 1 009

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah


Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19770103 200012 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI
SEKSI PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Surjadi, S.T**

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Agus Nain Sahabat, S.T., M.T**

Jabatan : Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

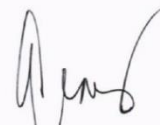
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

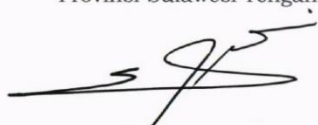
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pemberdayaan
Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan
Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah


Agus Nain Sahabat, ST., M.T
Pembina Tingkat I
Nip.19690808 199803 1 009


Surjadi, S.T
Penata Tingkat I
NIP. 19660606 200112 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimaturung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimaturung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI
SEKSI PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI**

Program Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah

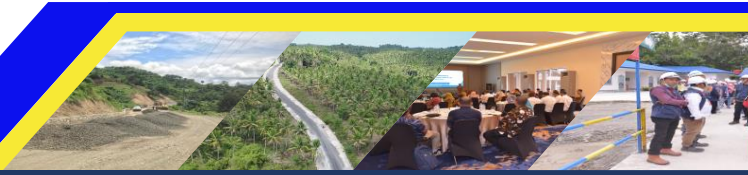
No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi Yang Bersertifikat Pelatihan	693 Orang
1.	Terpantaunya Dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Yang Dipantau Dan Dievaluasi Pelatihnnya	120 orang
2.	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang Mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	20 Lembaga
3.	Terlayannya Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (orang)	120 Orang
4.	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Mendapatkan Pelatihan (Orang)	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (orang)	120 Orang

Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi

Anggaran

Keterangan

1.	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Rp. 564.789.850	
2.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Rp. 229.376.600	
3.	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Rp. 298.877.750	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114

Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

Pemantauan dan
Evaluasi Pelatihan
4. Tenaga Kerja
Konstruksi Kualifikasi
Ahli

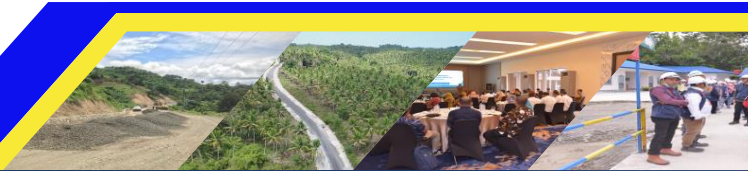
Rp. 42.074.350

Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Agus Nain Sahabat, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
Nip.19690808 199803 1 009

Kepala Seksi Pemberdayaan
Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga
dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Surjadi, S.T
Penata Tingkat I
NIP. 19660606 200112 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimaturung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimaturung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI
SEKSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Noval Zainuddin, S.T., M.Si**
Jabatan : Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Agus Nain Sahabat, S.T., M.T**
Jabatan : Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

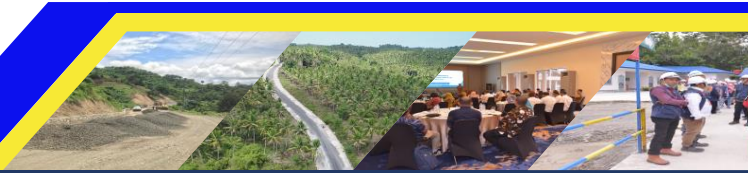
Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Agus Nain Sahabat, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
Nip.19690808 199803 1 009

Noval Zainuddin, S.T., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19761229 201001 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimaturung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimaturung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI
SEKSI PENGATURAN JASA KONSTRUKSI**

Program Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi	Penyelenggaraan layanan Jasa Konstruksi Sistem Infomasi (JAKON)	1 Dokumen
	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi Yang Dioperasikan	1 Layanan
	Tersedianya Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi Yang Disediakan	1 Dokumen

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi

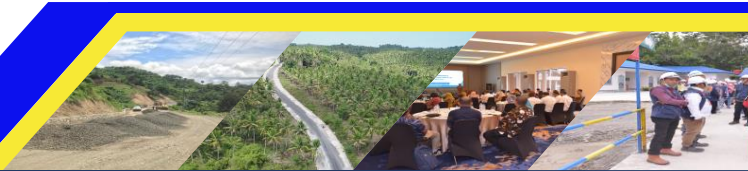
	Anggaran	Keterangan
Operasional Layanan		
1. Informasi Jasa Konstruksi	Rp. 125.115.550	
Tersedianya Penyediaan Data		
2. Informasi Jasa Konstruksi	Rp. 83.876.400	

Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Seksi Pengaturan
Jasa Konstruksi
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah


Agus Nain Sahabat, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
Nip.19690808 199803 1 009


Noval Zainuddin, S.T., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19761229 201001 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
TAHUN 2024

BIDANG PENATAAN RUANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Moh. Yasin Baculu, S.Sos., M.T**
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.**
Jabatan : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.

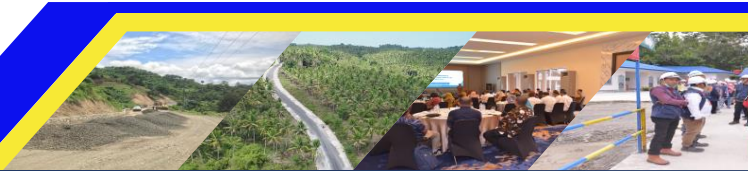
Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penataan Ruang
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Moh. Yasin Baculu, S.Sos., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19701028 199203 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19770103 200012 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimaturang_prov_sulteng@gmail.com Website : bimaturang.sultengprov.go.id

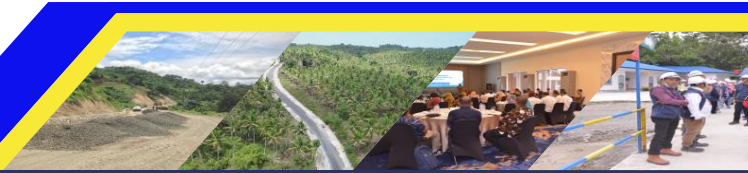
**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
TAHUN 2024
BIDANG PENATAAN RUANG**

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RT/RW	76,40%
Jabatan Fungsional			
1.	Terpenuhinya Sinkronisasi program RTRW Dan RPJMD	Jumlah dokumen yang disinkronkan	1 Dokumen
2.	Tersusunnya Pedoman NSPK pemberian insentif dan disinsentif	Jumlah Pedoman NSPK Pemberian Insentif Dan Disinsentif Yang Tersusun	150 Orang
3.	Terlaksananya Sosialisasi Pemahaman Masyarakat Terkait Rencana Tata Ruang Provinsi	Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Sosialisasi	1 Laporan
4.	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW Dan RDTR	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 1.635.354.125	

***Tugas & Fungsi Perencanaan Tata Ruang**

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp. 137.480.450	
2. Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Rp. 302.807.350	
3. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Rp. 58.747.900	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114

Email : bimatarang_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarang.sultengprov.go.id

- Monitoring dan Evaluasi
4. Penyusunan dan Penetapan RTRW Rp. 206.439.650
dan RDTR Kab/Kota

Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penataan Ruang
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Moh. Yasin Baculu, S.Sos., M.T

Pembina Tingkat I

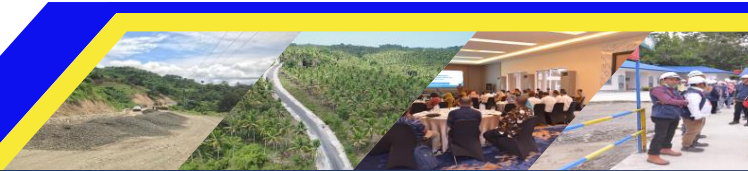
NIP. 19701028 199203 1 005

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19770103 200012 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114

Email : bimaturung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimaturung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG PENATAAN RUANG
SEKSI PEMANFAATAN RUANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sri Astuti, S.T., M.T**

Jabatan : Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Moh. Yasin Baculu, S.Sos., M.T**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penataan Ruang
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

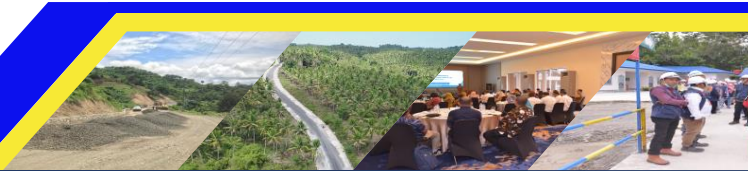
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Moh Yasin Baculu, S.Sos.,M.T

Pembina Tingkat I
NIP. 19701028 199203 1 005

Sri Astuti, S.T., M.T

Pembina
NIP. 19810207 200502 2 003



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114

Email : bimaturung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimaturung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG PENATAAN RUANG
SEKSI PEMANFAATAN RUANG**

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Pemanfaatan Ruang	74,93%
1.	Terbitnya Dokumen KKPR Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen KKPR	1 Dokumen
2.	Tersedianya Pengembangan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Pengembangan Sistem yang tersedia	1 Dokumen

**Koordinasi &
Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang
Daerah Provinsi**

Anggaran

Keterangan

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang | Rp. 211.915.800 |
| 2. | Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang | Rp. 228.112.025 |

Kepala Bidang Penataan Ruang
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Moh. Yasin Baculu, S.Sos., M.T

Pembina Tingkat I

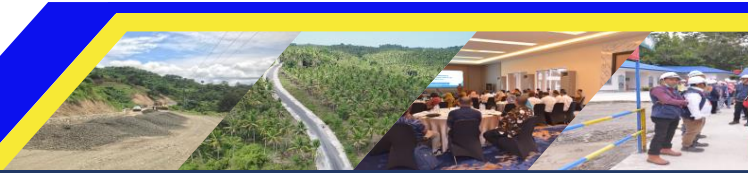
Nip. 19701028 199203 1 005

Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Sri Astuti, S.T., M.T

Pembina

NIP. 19810207 200502 2 003



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung.prov.sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG PENATAAN RUANG
SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ulfah Ramadhyanti, S.T**

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Moh. Yasin Baculu, S.Sos., M.T**

Jabatan : Kepala Bidang Penataan Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penataan Ruang
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Moh. Yasin Baculu, S.Sos., M.T
Penata Tingkat I
NIP. 19701028 199203 1 005

Palu, April 2024

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Ulfah Ramadhyanti, S.T
Penata Tingkat I
NIP. 19780817 200502 2 004



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

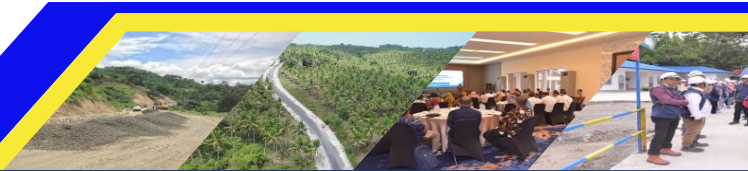
**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
BIDANG PENATAAN RUANG
SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

No.	Sasaran	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Pengendalian Tertib Tata Ruang	Persentase Penyelesaian Sengketa	1 Kasus
	Terlaksananya Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Penataan Ruang	Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus
2.	Meningkatnya Pengendalian Tertib Tata Ruang	Persentase Pengenaan Sanksi	2 Dokumen
	Terlaksananya Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sanksi yang diterapkan	1 Dokumen
	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK Fungsi Dan Manfaat	Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	1 Dokumen
3.	Meningkatnya Pengendalian Tertib Tata Ruang	Persentase Pemberian Insentif dan Disinsentif	1 Berita Acara
	Terlaksananya Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pemberian Insentif dan Disinsentif nonfiskal	1 Berita Acara

**Koordinasi & Sinkronisasi
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Daerah Provinsi**

	Anggaran	Keterangan
1. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Rp. 48.864.800	
2. Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Rp. 241.318.350	
3. Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Rp. 82.550.750	



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung.prov.sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

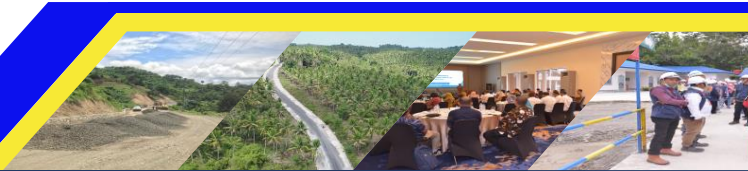
4. Pemberian Insentif & Disinsentif nonfiskal Rp. 117.117.050

Kepala Bidang Penataan Ruang
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Moh. Yasin Baculu, S.Sos., M.T
Pembina Tingkat I
Nip. 19701028 199203 1 005

Kepala Seksi Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Ulfah Ramadhyanti, S.T
Penata Tingkat I
NIP. 19780817 200502 2 004



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarang_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarang.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
TAHUN 2024**

UPT. LABORATORIUM DAN PENGUJIAN BAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yuris Milka, S.T., M.Si**
Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium dan Pengujian Bahan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.**
Jabatan : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

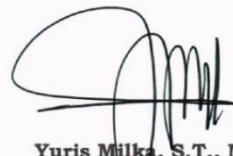
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2024.

Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala UPT. Laboratorium dan
Pengujian Bahan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

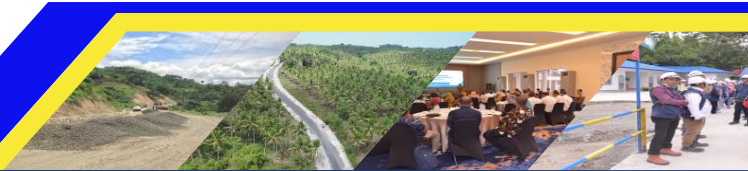
Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah



Yuris Milka, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770207 200112 2 002



Dr. Faidul Keteng, S.T., M.Si., M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19770103 200012 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
TAHUN 2024
UPT. LABORATORIUM DAN PENGUJIAN BAHAN**

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60%
2	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi	Meningkatnya Kualitas Mutu Dan Bahan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 2.156.426.431	
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 788.426.800	

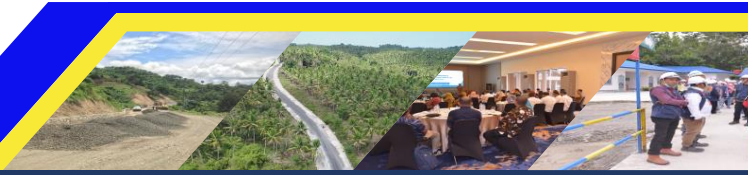
Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala UPT. Laboratorium dan
Penguujian Bahan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Yuris Milka, S.T., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19770207 200112 2 002

Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi
Sulawesi Tengah

Dr. Faddul Keteng, S.T., M.Si., M.T.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19770103 200012 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024**

**UPT. LABORATORIUM DAN PENGUJIAN BAHAN
SEKSI MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN MUTU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tasman, S.T., M.PWP**
Jabatan : Kepala Seksi Manajemen dan Pengendalian Mutu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Yuris Milka, S.T., M.Si**
Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium dan Pengujian Bahan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

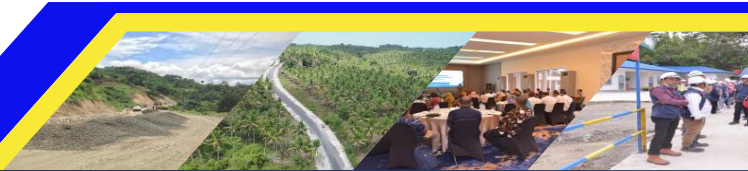
Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala UPT. Laboratorium dan
Pengujian Bahan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Yuris Milka, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770207200112 2 002

Pihak Pertama,
Kepala Seksi Manajemen dan
Pengendalian Mutu Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Tasman, S.T., M.PWP
Pembina
NIP. 19680101198903 1 017



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024**

**UPT. LABORATORIUM DAN PENGUJIAN BAHAN
SEKSI MANAJEMEN DAN PENGENDALIAN MUTU**

Program Penyelenggaraan Jalan

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Menjaga Kualitas Bahan Aspal, Beton, Dan Tanah	Persentase Kualitas Uji Mutu Bahan Aspal, Beton, Dan Tanah Yang Digunakan Berdasarkan SNI	100%
	Tersusunnya Dokumen Manajemen Mutu Laboratorium	Jumlah Dokumen Manajemen Mutu Laboratorium	1 Dokumen
	Terlaksananya Monitoring Uji Mutu	Jumlah Monitoring Uji Mutu	1 Dokumen

**Kegiatan Penyelenggaraan
Jalan Provinsi**

Anggaran

Keterangan

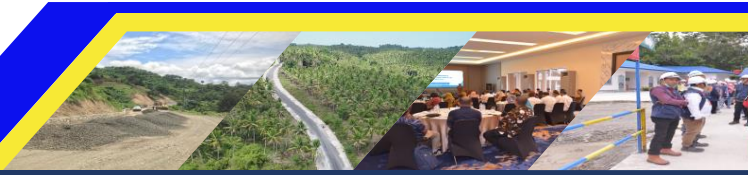
- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi
Pengembangan Jaringan Jalan
Serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan | Rp. 788.426.800 |
|----|--|-----------------|

Kepala UPT. Laboratorium dan
Penguujian Bahan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Seksi Manajemen dan
Pengendalian Mutu Dinas
Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Yuris Milka, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770207 200112 2 002

Tasman, S.T., M.PWP
Pembina
NIP. 19680101 198903 1 017



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung.prov.sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
UPT. LABORATORIUM DAN PENGUJIAN BAHAN
SUB BAGIAN TATA USAHA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nur Wahyuni, S.E.,M.M**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Yuris Milka, S.T.,M.Si**

Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium dan Pengujian Bahan

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala UPT. Laboratorium dan
Pengujian Bahan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Yuris Milka, S.T.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770207 200112 2 002

Nur Wahyuni, S.E.,M.M

Pembina

NIP. 19770712 200112 2 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimatarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimatarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
UPT. LABORATORIUM DAN PENGUJIAN BAHAN
SUB BAGIAN TATA USAHA**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Hukum Perangkat Daerah	60%
	Tertanganinya Permohonan Layanan Kepegawaian	Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian di UPT Laboratorium	1 Laporan
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	60%
	Terpenuhinya Jasa Layanan Kantor Di UPT Laboratorium	Jumlah Unit Kerja yang terpenuhinya jasa layanan kantor	1 Laporan
	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Di UPT Laboratorium	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik di UPT Laboratorium	14 Unit
3	Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Tingkat Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah	62%
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Di UPT Laboratorium	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor hasil pengadaan UPT Laboratorium	1 Paket
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	1 Dokumen
	Tersedianya Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	50 Paket
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	7 Orang
5	Meningkatnya Pemanfaatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik Perangkat Daerah	Indeks Tata Kelola pengadaan Barang Jasa (PBJ) perangkat Daerah	60%
	Terpeliharanya Peralatan Dan Mesin Lainnya Di UPT Laboratorium	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Terpelihara di UPT Laboratorium	190 Unit
	Terpeliharanya Gedung Kantor Di UPT. Laboratorium	Jumlah gedung yang terpelihara di UPT. Laboratorium	1 Unit



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114

Email : bimaturang_prov_sulteng@gmail.com Website : bimaturang.sultengprov.go.id

No	Sasaran	Indikator	Target
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya di UPT. Laboratorium	Jumlah Alat dan Mesin Lainnya yang dipelihara	42 Unit
	Tersedianya Mebel Kantor di UPT. Laboratorium	Jumlah Mebel yang diadakan	2 Paket

**Administrasi Umum
Perangkat Daerah**

Anggaran

Keterangan

- | | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 264.207.000 |
|----|--|-----------------|

**Penyedia jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah**

Anggaran

Keterangan

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp. 21.471.667 |
| 2. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. 158.400.000 |

**Penyedia jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah**

Anggaran

Keterangan

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 22.682.450 |
|----|--|----------------|

**Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah**

Anggaran

Keterangan

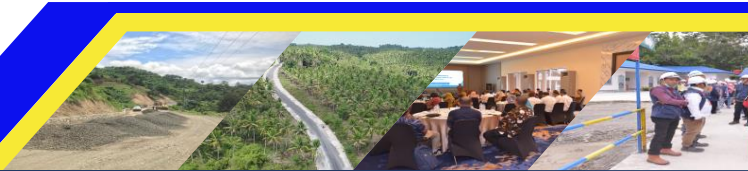
- | | | |
|----|---|----------------|
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Bimbingan Teknis | Rp. 34.235.000 |
| 2. | Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Rp. 57.226.000 |

**Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah**

Anggaran

Keterangan

- | | | |
|---|--|-----------------|
| 1 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 195.963.070 |
|---|--|-----------------|



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114

Email : bimatanungprov.sulteng@gmail.com Website : bimatanung.sultengprov.go.id

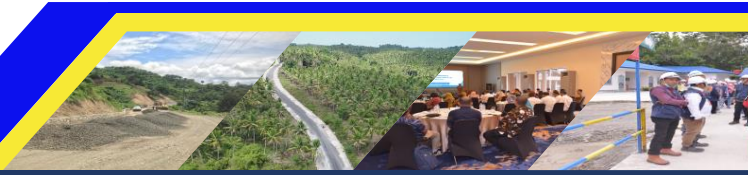
- | | | |
|---|---|-------------------|
| 2 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp. 200.000.000 |
| 3 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp. 1.084.735.000 |
| 4 | Pengadaan Mebel | Rp. 26.718.000 |

Kepala UPT. Laboratorium dan Pengujian Bahan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Yuris Milka, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770207 200112 2 002

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

Nur Wahyuni, S.E., M.M
Pembina
NIP. 19770712 200112 2 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax (0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimalarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimalarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
UPT. LABORATORIUM DAN PENGUJIAN BAHAN
SEKSI PELAYANAN & PENGUJIAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Zulkifli, S.T., M.M**
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan dan Pengujian

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Yuris Milka, S.T., M.Si**
Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium dan Pengujian Bahan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala UPT. Laboratorium dan
Pengujian Bahan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

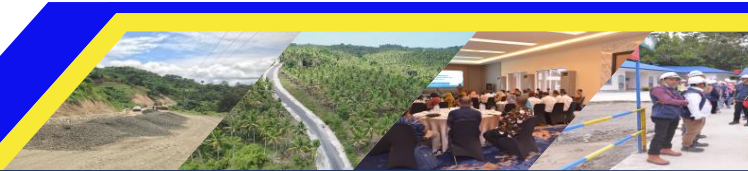
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pelayanan dan
Pengujian
Dinas Bina Marga dan Penataan
Ruang Provinsi Sulawesi Tengah



Yuris Milka, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770207 200112 2 002



Zulkifli, S.T., M.M
Penata Tingkat I
NIP. 19810814 201001 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Towua No. 85 Palu, Telp./Fax(0451) 481540 - 483303, Kode Pos 94114
Email : bimafarung_prov_sulteng@gmail.com Website : bimafarung.sultengprov.go.id

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TAHUN 2024
UPT. LABORATORIUM DAN PENGUJIAN BAHAN
SEKSI PELAYANAN & PENGUJIAN**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Menjaga Kualitas Bahan, Aspal, Beton Dan Tanah	Persentase Kualitas Bahan Aspal, Beton, Dan Tanah Yang Digunakan Berdasarkan SNI	100%
1	Terlayannya Permohonan Pengujian Bahan Aspal, Beton, Dan Tanah	Jumlah Permohonan Bahan Aspal, Beton, Dan Tanah	1 Dokumen
2	Terlaksananya Bahan Aspal, Beton, Dan Tanah	Jumlah Pengujian Bahan Aspal, Beton, Dan Tanah	1 Laporan

**Administrasi Umum
Perangkat Daerah**

Anggaran

Keterangan

1. Penyediaan Bahan/Material Rp. 90.788.244

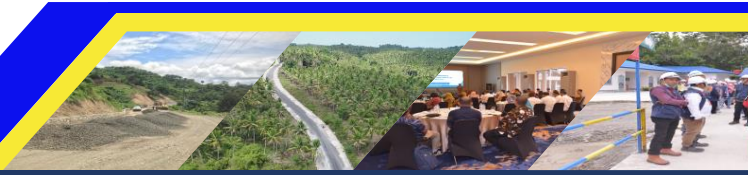
Palu, April 2024

Pihak Kedua,
Kepala UPT. Laboratorium dan
Pengujian Bahan
Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah

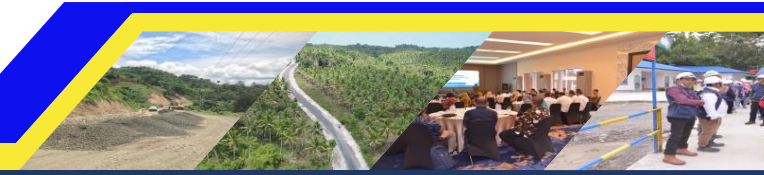
Pihak Pertama,
Kepala Seksi Pelayan dan
Pengujian
Dinas Bina Marga dan Penataan
Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

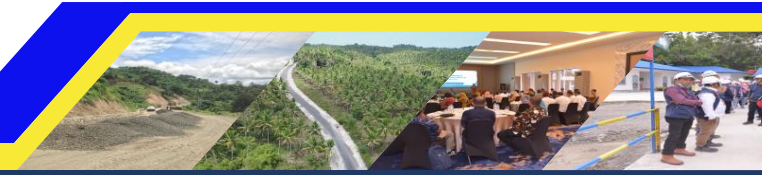
Yuris Milka, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770207200112 2 002

Zulkifli, S.T., M.M
Penata Tingkat I
NIP. 19810814 201001 1 002

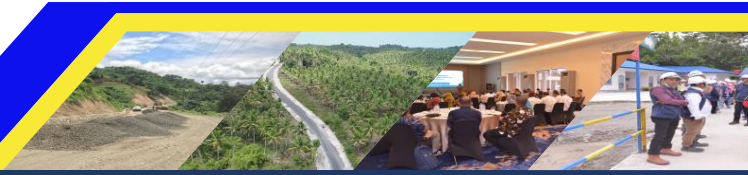


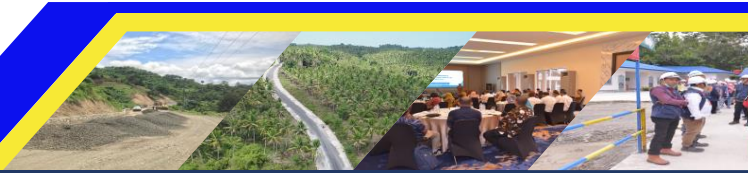
DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

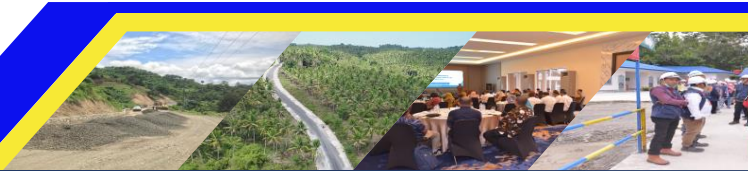










**BARCODE LKJPD DINAS BMPR 2024**

<https://bit.ly/4hop3Ye>

2024

